

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM)
PADA UMKM DI KECAMATAN SUPPA
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**MUH. ASRUL AGUS
NIM: 19.2800.048**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM)
PADA UMKM DI KECAMATAN SUPPA
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**MUH. ASRUL AGUS
NIM: 19.2800.048**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Akuntansi
(S. Tr.Ak) Pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Standar Akuntansi
Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah
(SAK EMKM) pada UMKM di Kecamatan
Suppa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Muh. Asrul Agus

Nim : 19.2800.048

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Sk. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor B-5825/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2025

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama
NIDN

: Rismala, M.Ak (.....)
: 2105118403

Mengetahui

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Andi Bahri, S. M.E., M.Fil.I.
NIP. 19781101 2009 12 1 003

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Standar Akuntansi
Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah
(SAK EMKM) pada UMKM di Kecamatan
Suppa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Muh. Asrul Agus

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2800.048

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Pogram Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Sk. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor B-5825/In.39/Febi.04/PP.00.9//12/2025

Tanggal Kelulusan : 13 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Rismala, M. Ak	(Ketua)	(.....)
Ira Sahara, M. Ak	(Anggota)	(.....)
Rini Purnamasari, M. Ak	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



[Signature]
Dr. Andi Bahri S. M.E., M.Fil.I.
NIP. 19781101 2009 12 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, nikmat kesehatan, kekuatan, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (Sak Emkm) Pada Umkm Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam yang istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini merupakan proses pembelajaran yang memberikan banyak pengalaman, wawasan, serta pelajaran berharga bagi penulis. Berbagai tantangan, hambatan, dan keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian menjadi bagian dari perjalanan akademik. Berkat doa, dukungan, bimbingan, kerja sama, serta bantuan dari berbagai pihak, seluruh tahapan penelitian mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis hasil penelitian, hingga penyusunan laporan akhir dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, memberikan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, motivasi, serta doa yang tidak pernah putus kepada penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, serta membalas segala pengorbanan dan kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, arahan, motivasi, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah memimpin dan mengembangkan IAIN Parepare serta menyediakan berbagai fasilitas akademik sehingga penulis dapat menempuh pendidikan dan menyelesaikan studi dengan baik.
2. Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare yang senantiasa memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan fakultas.
3. Ibu Rismala, M.Ak., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan ketelitian telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta perhatian untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi, saran, motivasi, dan masukan yang sangat berarti kepada penulis sejak penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, hingga selesainya skripsi ini.
4. Ibu Ira Sahara, M.Ak. selaku penguji I dan Ibu Rini Purnamasari, M.Ak. selaku penguji II yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan arahan yang membangun sehingga skripsi ini dapat disempurnakan dengan lebih baik
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, nilai-nilai akademik, serta motivasi selama penulis menempuh pendidikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh staf administrasi dan tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pelayanan, bantuan, dan kemudahan administrasi yang diberikan selama masa studi.

6. Keluarga Besar Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, khususnya angkatan 2019, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas kebersamaan, persahabatan, semangat, kerja sama, motivasi, dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama menjalani proses perkuliahan.
7. Sahabat, teman seperjuangan, serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, bantuan, dukungan moril maupun materiel, semangat, dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan syariah. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun peneliti selanjutnya yang memiliki kajian serupa sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Parepare, 1 Juli 2026
16 Muharam 1448 H

Penulis,



Muh. Asrul Agus
NIM: 19.2800.048

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Asrul Agus
Nim : 19.2800.048
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 03 Agustus 2001
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan
Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM)
Pada Umkm Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Juli 2026
16 Muharam 1448 H

Penulis,



Muh. Asrul Agus
NIM: 19.2800.048

ABSTRAK

Muh. Asrul Agus. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.* (dibimbing oleh Rismala).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang tidak kecil dalam menggerakkan roda perekonomian dan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Meski demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum menjalankan praktik pencatatan dan pelaporan keuangan sebagaimana mestinya sesuai standar akuntansi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pencatatan laporan keuangan yang dijalankan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sekaligus menilai sejauh mana praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan SAK EMKM.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap delapan pelaku UMKM, kemudian diolah melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

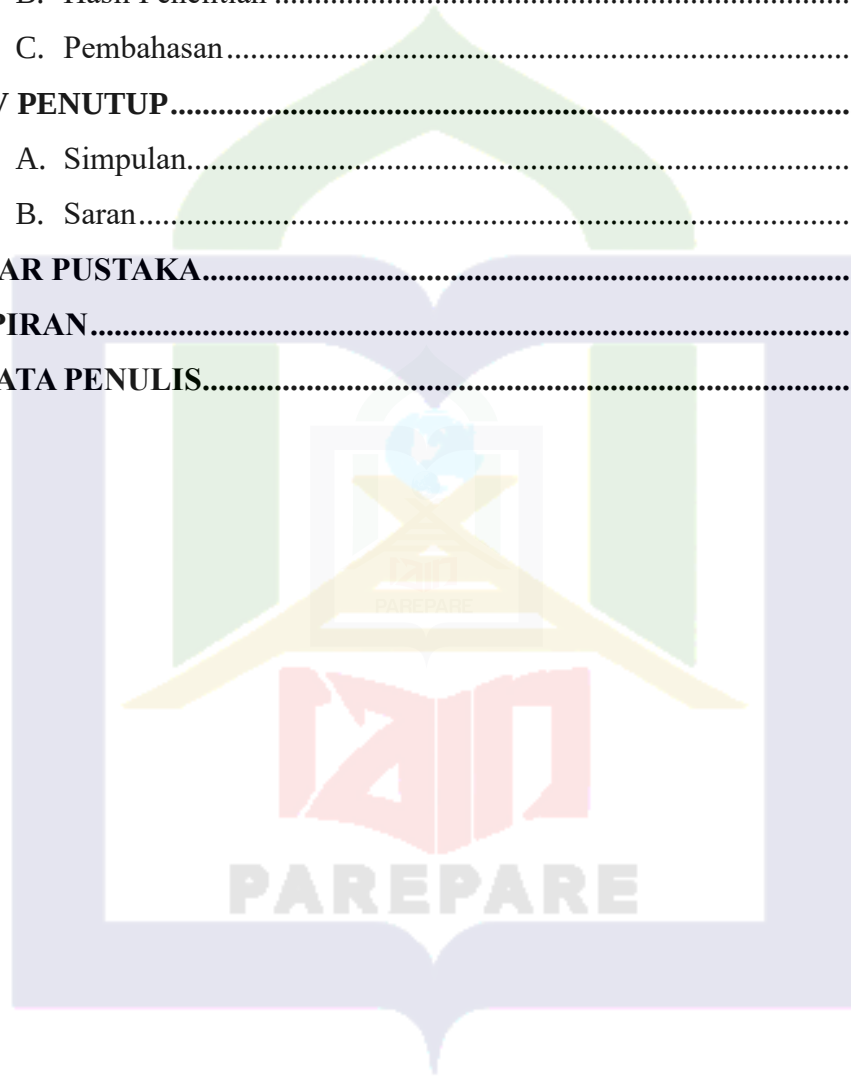
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik pencatatan keuangan yang dijalankan para pelaku UMKM masih sangat sederhana dan belum mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi yang benar. Sebagian besar pelaku UMKM tidak melakukan pencatatan transaksi secara rutin dan hanya sebatas mencatat penjualan atau menyimpan nota transaksi, pelaku UMKM belum menyusun laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, maupun catatan atas laporan keuangan sesuai dengan yang dipersyaratkan SAK EMKM. Kendala yang paling banyak ditemukan mencakup rendahnya pemahaman tentang akuntansi, minimnya pengetahuan mengenai SAK EMKM itu sendiri, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya akses terhadap pelatihan dan pendampingan yang memadai. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi akuntansi dan penguatan pendampingan bagi para pelaku UMKM menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera diwujudkan.

Kata Kunci: *SAK EMKM, UMKM, laporan keuangan, pencatatan keuangan, Kecamatan Suppa.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	13
C. Kerangka Konseptual	31
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37

F. Uji Keabsahan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	45
B. Hasil Penelitian	47
C. Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP	65
A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS.....	XXV



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Kisi-kisi Analisis Data Penelitian	45
4.1	Jumlah UMKM Kecamatan Suppa Menurut Desa/Kelurahan	47
4.2	Profil Informan Penelitian	49
4.3	Ringkasan Sistem Pencatatan Keuangan Informan	51
4.4	Matriks Kesesuaian Pencatatan Keuangan UMKM dengan SAK EMKM	54
4.5	Kode Tematik Kendala Penerapan SAK EMKM	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Meneliti	I
2	Surat Izin Meneliti (Dinas)	II
3	Surat selesai Meneliti	III
3	Pedoman Wawancara Penelitian	IV
4	Transkrip Wawancara Informan I.1	VII
5	Transkrip Wawancara Informan I.2	VIII
6	Transkrip Wawancara Informan I.3	X
7	Transkrip Wawancara Informan I.4	XII
8	Transkrip Wawancara Informan I.5	XIV
9	Transkrip Wawancara Informan I.6	XVI
10	Transkrip Wawancara Informan I.7	XVIII
11	Transkrip Wawancara Informan I.8	XX
12	Matriks Koding Ringkas	XXII
13	Dokumentasi Penelitian	XXIII

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Dalam bahasa Arab, fonem konsonan ditulis menggunakan huruf-huruf khusus yang kemudian memerlukan penyesuaian ketika dialihkan ke dalam sistem tulisan Latin. Proses transliterasi ini tidak seragam untuk semua huruf, sebab sebagian konsonan Arab diwakili oleh huruf Latin biasa, sebagian lainnya menggunakan tanda khusus, dan sebagian lagi memerlukan kombinasi antara huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini adalah daftar huruf Arab beserta padanannya dalam transliterasi Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan Sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah yang berada di awal kata mengikuti huruf vokal pengirinya tanpa memerlukan penanda khusus, sedangkan jika berada di tengah atau di akhir kata, kehadirannya ditandai dengan apostrof. (’).

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Harakat	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan perpaduan antara harakat dan huruf, dan cara penulisan transliterasinya pun menggunakan gabungan dua huruf sekaligus.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َايَ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
َاوَ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah (Vokal Panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda garis di atas (̄), sebagai berikut

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	A dengan garis di atas
إِي	Kasrah dan Ya	Ī	I dengan garis di atas
أُو	Dhammah dan Wau	Ū	U dengan garis di atas

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah bagian penting dari sektor ekonomi yang membantu mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Di tingkat daerah, usaha mikro kecil menengah (UMKM) bukan hanya memberi penghasilan bagi keluarga, tetapi juga membantu menciptakan pekerjaan, menggerakkan modal berputar, serta memperkuat perekonomian setempat. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan sistem informasi keuangan yang baik dalam pengelolaan UMKM agar pelaku usaha bisa mengerti perkembangan usaha mereka, kemampuan mendapatkan laba, kondisi aset dan kewajiban, serta kebutuhan pembiayaan secara lebih tepat.

Dalam perspektif Islam, setiap aktivitas muamalah, termasuk kegiatan usaha dan pengelolaan keuangan, harus dilaksanakan secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya pencatatan setiap transaksi sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan terhadap hak para pihak.

Allah Swt berfirman dalam QS Al-Baqarah (2): 282:

كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيُكْتَبَ فَاكْتُبُوهُ مُمْسَىٰ اَجَلٍ اِلَىٰ بَدَيْنِ تَدَايُنْتُمْ اِذَا اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يٰۤاَيُّهَا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِيْ وَلِيْمُلِّ فَلْيُكْتَبْ اللّٰهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتُبُ اَنْ كَاتِبٌ يٰۤاَبَ وَلَا بِالْعَدْلِ اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ سَفِيْهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِيْ كَانَ فَاِنْ شَيْئًا مِنْهُ يَبْخَسْ وَلَا رَبَّهٗ اللّٰهُ وَلِيَتَّقِ لَمْ فَاِنْ رَّجَالَكُمْ مِنْ شٰهِدَيْنِ وَاسْتَشْهَدُوْا بِالْعَدْلِ وَلِيَّهٗ فَلْيُمْلَلْ هُوَ يُمْلَلُ اَنْ يَسْتَطِيْعَ لَا فَتَذَكَّرَ اِحْدٰهُمَا تَضِلَّ اَنْ الشُّهَدَاءِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَّامْرَاتِنِ فَرَجُلٌ رَّجُلَيْنِ يَكُوْنَا صَغِيْرًا تَكْتُبُوْهُ اَنْ تَسْمُوْا وَلَا ۖ دُعُوْا مَا اِذَا الشُّهَدَاءُ يٰۤاَبَ وَلَا الْاٰخَرٰى اِحْدٰهُمَا اَنْ اِلَّا تَرْتَابُوْا اِلَّا وَاَدْنٰى لِلشَّهَادَةِ وَاَقُوْمُ اللّٰهُ عِنْدَ اَقْسَطْ ذٰلِكُمْ اَجَلَهٗ اِلَىٰ كَثِيْرًا اَوْ

إِذَا وَاشْهَدُوا تَكْتُبُوهَا إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تِجَارَةً تَكُونُ
 اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ بَكُمْ فَسُوقٌ فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ هُ شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا ۖ تَبَايَعْتُمْ
 عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ ۖ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمْ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pentingnya pencatatan transaksi sebagai bentuk perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan muamalah. Perintah untuk menuliskan transaksi mencerminkan nilai transparansi, akuntabilitas, ketelitian, dan tanggung jawab dalam mengelola harta. Prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan praktik akuntansi modern, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Melalui pencatatan yang sistematis

dan sesuai standar, pelaku UMKM dapat menghasilkan informasi keuangan yang andal, sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, serta memperkuat keberlangsungan usaha.

Akuntansi adalah sistem informasi yang membantu orang yang berbisnis untuk mencatat, mengelompokkan, mengukur, dan menyajikan transaksi keuangan. Dalam konteks usaha kecil menengah, mencatat keuangan secara sederhana namun teratur bisa membantu pemilik usaha membedakan uang pribadi dan uang usaha, menghitung berapa pendapatan dan pengeluaran, mengetahui apakah usaha menghasilkan keuntungan atau kerugian, serta mengevaluasi keputusan yang sudah diambil. Tanpa catatan yang cukup, para pelaku UMKM biasanya mengandalkan ingatannya sendiri dan perkiraan, sehingga informasi keuangan yang digunakan dalam membuat keputusan cenderung tidak tepat.

Ikatan Akuntan Indonesia telah menetapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan bagi perusahaan dengan ukuran mikro, kecil, dan menengah. SAK EMKM dirancang lebih mudah dibandingkan standar akuntansi lainnya karena menggunakan dasar pengukuran berdasarkan biaya historis dan menangani transaksi umum yang sering terjadi pada perusahaan mikro, kecil, dan menengah. Laporan keuangan paling dasar berdasarkan SAK EMKM mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.¹

Penerapan SAK EMKM menjadi hal yang tidak bisa diabaikan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketika laporan keuangan disusun secara tertib dan terstruktur, usaha tersebut akan tampak lebih bertanggung jawab, transparan, dan layak dipercaya oleh berbagai pihak. Lebih dari itu, laporan keuangan yang baik membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan, baik dari perbankan, koperasi, investor, maupun berbagai program bantuan pemerintah.

¹ Ikatan Akuntan Indonesia, "Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah," Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan 33 (2016).

Sayangnya, kondisi di lapangan masih jauh dari yang diharapkan. Banyak usaha kecil dan menengah yang belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Penyebabnya pun beragam, mulai dari minimnya pengetahuan akuntansi, keterbatasan sumber daya manusia, hingga kebiasaan mengelola usaha secara informal yang sudah mengakar, ditambah masih kurangnya pendampingan dan sosialisasi dari pihak terkait.

Selain menekankan pentingnya pencatatan transaksi, Islam juga mengajarkan bahwa setiap amanah harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai amanah tersebut menjadi landasan moral bagi pelaku usaha dalam menyusun laporan keuangan yang jujur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Allah Swt. Berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap amanah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Dalam konteks pengelolaan usaha, penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk amanah yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM kepada berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemilik usaha, kreditor, investor, maupun pemerintah. Oleh karena itu, penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) tidak hanya bertujuan memenuhi ketentuan akuntansi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam berupa amanah, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam

menyajikan informasi keuangan sehingga laporan yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

Kecamatan Suppa di Kabupaten Pinrang sendiri merupakan wilayah dengan aktivitas usaha yang cukup dinamis. Berbagai jenis UMKM tumbuh di sana, mencakup sektor perdagangan, jasa, kuliner, peternakan, perikanan, hingga usaha berbasis rumah tangga. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini, pada tahun 2026 tercatat sebanyak 660 UMKM yang tersebar di sepuluh desa dan kelurahan di kecamatan tersebut. Konsentrasi terbesar berada di Kelurahan Tellumpanua dengan 200 unit usaha, disusul Desa Lero sebanyak 151 unit, Desa Tasiwalie 79 unit, Kelurahan Watang Suppa 76 unit, dan Desa Maritengngae sebanyak 69 unit. Persebaran ini memperlihatkan bahwa Kecamatan Suppa menyimpan potensi ekonomi yang cukup besar, dan potensi tersebut akan semakin kuat jika didukung oleh pengelolaan keuangan yang lebih baik. Namun ketika dilakukan pengamatan langsung terhadap para pelaku UMKM di wilayah tersebut, gambaran yang muncul cukup memprihatinkan. Praktik pencatatan keuangan yang mereka jalankan masih sangat sederhana dan jauh dari standar. Sebagian informan sama sekali tidak melakukan pencatatan, sementara yang lain hanya mencatat penjualan harian, jumlah produk yang terjual, atau sekadar menyimpan struk pembelian. Komponen penting seperti biaya operasional, aset, kewajiban, modal, dan beban usaha nyaris tidak pernah dicatat secara memadai. Yang lebih mencolok, tidak satu pun dari para informan yang membuat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, maupun catatan atas laporan keuangan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam SAK EMKM. Kondisi ini mempertegas adanya jurang yang cukup lebar antara standar yang seharusnya diterapkan dan praktik nyata di lapangan.

Berangkat dari latar belakang itulah penelitian ini disusun, dengan tujuan menganalisis sejauh mana SAK EMKM telah diterapkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Fokus kajiannya meliputi sistem pencatatan keuangan yang selama ini digunakan, tingkat

kesesuaian praktik pencatatan dan pelaporan keuangan dengan ketentuan SAK EMKM, serta berbagai hambatan yang menghalangi penerapannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkret tentang kondisi pengelolaan keuangan UMKM saat ini, sekaligus menjadi referensi yang berguna bagi pemerintah daerah, lembaga pendamping UMKM, kalangan akademisi, maupun para pelaku usaha itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pencatatan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?
3. Apa saja kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam menerapkan SAK EMKM di Kecamatan Suppa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pencatatan laporan keuangan yang diterapkan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
2. Untuk menganalisis kesesuaian laporan keuangan yang disusun oleh pelaku UMKM di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berkembangnya ilmu pengetahuan, terutama di bidang akuntansi keuangan, khususnya dalam hal penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara teoritis, penelitian ini bisa membantu memperkaya buku catatan tentang penerapan standar akuntansi di lembaga yang tidak memiliki akuntabilitas publik, serta memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai sejauh mana pengusaha UMKM mematuhi aturan dalam membuat laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk penelitian lain yang membahas topik yang sama, terutama terkait literasi keuangan, pemahaman tentang standar akuntansi, serta dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan bisa membantu para pelaku UMKM memahami dengan lebih baik pentingnya membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Dengan memahami hal tersebut, para pelaku UMKM diharapkan dapat membuat pencatatan keuangan dengan lebih rapi, teratur, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak hanya melakukan pencatatan secara kasar atau bahkan tidak mencatat sama sekali, seperti yang masih sering terjadi di lapangan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pemerintah atau lembaga terkait dalam meningkatkan pembinaan, bimbingan, serta pelatihan akuntansi bagi pengusaha UMKM, terutama

dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Penelitian ini menjelaskan secara jelas bagaimana akuntansi diterapkan di lapangan, termasuk berbagai hambatan yang dialami oleh pelaku UMKM, seperti kurangnya pemahaman dalam membuat laporan keuangan, rendahnya kesadaran dalam mencatat keuangan, serta belum maksimalnya penggunaan standar akuntansi yang telah ditetapkan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber acuan dan bahan referensi bagi para peneliti di masa depan yang ingin mempelajari penerapan standar akuntansi di UMKM, terutama dalam hal Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Penelitian ini menghasilkan gambaran nyata mengenai bagaimana akuntansi diterapkan di lapangan, termasuk tingkat pemahaman para pelaku usaha, cara mereka mencatat keuangan, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu sangat di butuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu dapat memberikan persamaan dan perbedaan antara bidang yang diselidiki dan penelitian sebelumnya, karena ini bukan pertama kalinya penelitian ini dilakukan. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sulvi Shafira Amalia dengan judul “Persepsi Pelaku UMKM terhadap Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM di Kota Parepare” bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM di Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami secara baik konsep dan penerapan SAK EMKM. Pencatatan keuangan yang dilakukan masih bersifat sederhana dan belum memenuhi komponen laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Kendala yang dihadapi antara lain rendahnya pengetahuan akuntansi, kurangnya sosialisasi mengenai SAK EMKM, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan.²

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus pembahasan yang sama, yaitu mengenai penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada UMKM. Keduanya juga

² Sulvi Shafira Amalia, “Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis Sak-Emkm Di Parepare (Analisis Akuntansi Syariah),” 2022.

mengkaji tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian Sulvi Shafira Amalia dilakukan di Kota Parepare, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Selain itu, penelitian Sulvi Shafira Amalia lebih berfokus pada persepsi pelaku UMKM terhadap SAK EMKM, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada analisis penerapan dan kesesuaian laporan keuangan UMKM dengan ketentuan SAK EMKM secara langsung. Dengan demikian, penelitian penulis diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai tingkat penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Suppa. dibandingkan penelitian sebelumnya.

2. Firda Azis dalam penelitiannya yang berjudul "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan pada Toko Nur Rappang" berupaya menelaah bagaimana SAK EMKM diterapkan dalam praktik serta sejauh mana penerapan tersebut berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan mengandalkan observasi, wawancara, serta dokumentasi sebagai instrumen pengumpulan data, penelitian ini menemukan bahwa kehadiran SAK EMKM membawa perubahan yang berarti. Pencatatan keuangan yang sebelumnya dilakukan secara acak menjadi lebih tertib dan terorganisasi, sehingga informasi yang tersaji pun lebih akurat dan dapat dijadikan landasan yang lebih andal dalam pengambilan keputusan bisnis.³

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian yang sama, yaitu mengkaji penerapan SAK EMKM pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Keduanya juga menggunakan

³ Firda Azis, "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Emkm Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada Toko Nur Rappang," 2024.

pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai praktik penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian Firda Azis hanya berfokus pada satu usaha yaitu Toko Nur Rappang, sedangkan penelitian penulis mencakup beberapa UMKM di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Selain itu, penelitian Firda Azis lebih menitikberatkan pada pengaruh penerapan SAK EMKM terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada tingkat penerapan dan kesesuaian laporan keuangan UMKM dengan standar SAK EMKM serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

3. Penelitian Indah Reski Amelia melalui penelitiannya yang berjudul "Persepsi Pengelola UMKM terhadap Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM di Kecamatan Panca Rijang" berusaha mengungkap bagaimana para pengelola UMKM memandang dan memahami proses penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada SAK EMKM. Penelitian ini dijalankan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa pemahaman sebagian besar pengelola UMKM terhadap SAK EMKM masih belum memadai, yang pada akhirnya berimbas pada praktik pencatatan keuangan mereka yang cenderung dilakukan secara seadanya dan belum sejalan dengan ketentuan standar yang berlaku.⁴

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian yang sama, yaitu UMKM, serta sama-sama membahas laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Keduanya juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan standar akuntansi pada UMKM. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian Indah Reski Amelia lebih menekankan pada

⁴ Indah Reski Amelia, "Persepsi Pengelola Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis Sak Emkm Di Kecamatan Panca Rijang," 2025.

persepsi dan pemahaman pengelola UMKM terhadap SAK EMKM, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada analisis penerapan serta kesesuaian laporan keuangan dengan standar SAK EMKM. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, yaitu Kecamatan Panca Rijang dan Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

4. Dewi Asnita dalam penelitiannya yang berjudul "Penerapan Akuntansi Syariah terhadap Laporan Keuangan Toko Rezky Sidenreng Rappang" bermaksud menelaah bagaimana praktik akuntansi dijalankan dalam proses penyusunan laporan keuangan pada usaha yang menjadi objek kajiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai cara memperoleh data. Hasil yang ditemukan mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang selama ini dibuat masih sangat sederhana dan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan standar akuntansi yang berlaku, kondisi ini terutama dipicu oleh terbatasnya pemahaman pemilik usaha dalam hal penyusunan laporan keuangan yang benar.⁵

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai praktik pencatatan dan penyusunan laporan keuangan pada usaha mikro dan kecil. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kondisi yang terjadi di lapangan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian Dewi Asnita menitikberatkan pada penerapan akuntansi syariah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penerapan SAK EMKM. Selain itu, objek penelitian Dewi Asnita hanya satu usaha, sedangkan penelitian penulis mencakup beberapa UMKM di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

5. Nurhayati melalui penelitiannya yang berjudul "Implementasi Akuntansi Syariah dalam Laporan Keuangan pada UMKM di Kecamatan Cempa

⁵ Dewi Asnita, "Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Laporan Keuangan Toko Rezky Sidenreng Rappang" (IAIN PAREPARE, 2022).

Kabupaten Pinrang" berupaya menjawab pertanyaan tentang bagaimana akuntansi diimplementasikan dalam proses penyusunan laporan keuangan di kalangan pelaku UMKM. Penelitian ini dijalankan dengan metode kualitatif, di mana data dihimpun melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa meskipun sebagian besar UMKM yang diteliti sudah menjalankan aktivitas pencatatan keuangan, mereka belum sampai pada tahap menyusun laporan keuangan secara menyeluruh dan utuh sebagaimana yang dipersyaratkan oleh standar yang berlaku.⁶

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek yang diteliti yaitu UMKM serta sama-sama mengkaji praktik penyusunan laporan keuangan pada pelaku usaha. Selain itu, kedua penelitian juga dilakukan di wilayah Kabupaten Pinrang sehingga memiliki karakteristik lingkungan usaha yang relatif serupa. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian Nurhayati membahas implementasi akuntansi syariah, sedangkan penelitian penulis secara khusus menganalisis penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki fokus yang lebih spesifik terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi UMKM.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan tidak lahir dari satu tokoh tunggal, melainkan tumbuh secara bertahap melalui kontribusi berbagai peneliti dari bidang sosiologi, psikologi, dan hukum. Salah satu nama yang kerap disebut dalam diskusi mengenai fondasi teori ini adalah Herbert C. Kelman, yang mengemukakan bahwa kepatuhan seseorang pada dasarnya dapat dijelaskan

⁶ Nurhayati, "Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Laporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang," 2023.

melalui tiga proses yang berbeda. Pertama adalah *compliance*, yaitu kepatuhan yang muncul semata-mata karena adanya tekanan dari luar diri individu. Kedua adalah *identification*, di mana seseorang taat karena didorong oleh keinginan untuk mendapat pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Ketiga adalah *internalization*, yakni kepatuhan yang berakar dari kesadaran murni dalam diri sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun.⁷ Di luar Kelman, pemikiran Max Weber juga memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap konsep kepatuhan ini. Weber berpandangan bahwa seseorang mengikuti aturan karena mengakui adanya otoritas dan legitimasi dari kekuasaan yang menetapkan aturan tersebut.⁸

Konsep kepatuhan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menaati ketentuan dan memenuhi setiap komitmen yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, setiap pelaku usaha dituntut untuk mematuhi aturan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab dan integritas.

Allah Swt. Berfirman dalam QS. Al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Unsur utama dalam teori kepatuhan meliputi: (1) adanya aturan atau standar sebagai pedoman, yakni SAK EMKM bagi UMKM; (2) pihak yang

⁷ Herbert C Kelman, "Processes of Opinion Change," in *Attitude Change* (Routledge, 2017), 205–33.

⁸ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, vol. 2 (University of California press, 1978).

wajib mematuhi aturan, yaitu pelaku UMKM sebagai penyusun laporan; (3) kesadaran dan pemahaman terhadap aturan yang memengaruhi tingkat kepatuhan; (4) pengawasan dari pemerintah, lembaga keuangan, maupun pihak eksternal; serta (5) sanksi atau konsekuensi atas pelanggaran yang mendorong kepatuhan.

Dalam penelitian ini, teori kepatuhan digunakan untuk menjelaskan penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Suppa. UMKM diharapkan mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar sebagai bentuk ketaatan terhadap regulasi akuntansi. Tingkat kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh literasi keuangan, pemahaman terhadap SAK EMKM, serta pemanfaatan digitalisasi keuangan yang mendukung pencatatan dan pelaporan. Semakin tinggi literasi, pemahaman, dan dukungan teknologi, semakin besar pula peluang UMKM untuk patuh terhadap standar akuntansi. Dengan demikian, teori kepatuhan menjadi landasan untuk menilai sejauh mana UMKM di Kecamatan Suppa mengikuti ketentuan akuntansi dalam menyusun laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator kepatuhan UMKM terhadap SAK EMKM meliputi:

a. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar

Penyusunan laporan keuangan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengacu pada standar akuntansi yang telah ditetapkan, seperti SAK, SAP, maupun IFRS. Kepatuhan terhadap standar-standar tersebut menjadi syarat mutlak agar informasi yang tersaji dapat diperbandingkan antar entitas, mudah dipahami oleh berbagai kalangan, dan layak untuk dipercaya. Kesesuaian dengan standar ini bukan hanya soal format tampilan, tetapi menyentuh aspek-aspek yang lebih substantif, seperti bagaimana pendapatan diakui, bagaimana aset dan kewajiban diukur, serta metode penyusutan mana yang paling tepat diterapkan sesuai dengan karakteristik dan jenis usaha

yang bersangkutan. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan tidak akan menimbulkan kerancuan interpretasi dan dapat diperiksa secara objektif oleh pihak independen.⁹

b. Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan

Sebuah laporan keuangan baru bisa dikatakan lengkap apabila memuat seluruh komponen yang diwajibkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Komponen-komponen tersebut meliputi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Keberadaan masing-masing komponen bukan sekadar formalitas, karena satu sama lain saling mengisi dan melengkapi dalam menyajikan gambaran yang utuh mengenai kondisi serta kinerja keuangan suatu entitas. Apabila salah satu komponen tidak tersedia, maka informasi yang disajikan menjadi tidak lengkap dan hanya mencerminkan sebagian dari realitas yang sesungguhnya. Kondisi semacam ini sangat berisiko, sebab dapat memicu kesalahan dalam proses analisis maupun pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan yang mengandalkan laporan tersebut.¹⁰

c. Konsistensi dalam Pencatatan Transaksi Keuangan

Prinsip konsistensi menuntut setiap entitas untuk tidak berganti-ganti kebijakan dan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya. Hal ini berlaku dalam berbagai aspek, mulai dari metode penilaian persediaan seperti FIFO atau rata-rata tertimbang, metode penyusutan aset tetap, hingga cara pengakuan pendapatan. Keseragaman penerapan inilah yang menjadi jaminan bahwa laporan keuangan dari

⁹ Tri Sukma Ayu Purba et al., “Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Di Indonesia,” *Economics and Digital Business Review* 6, no. 2 (2025): 1322–30.

¹⁰ M Ainul Fadlol, Titin Kartini, and Sri Kantun, “Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Oryza Mart Jember Periode 2017,” *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 12, no. 2 (2018): 270–76.

periode yang berbeda dapat diperbandingkan secara wajar dan menghasilkan kesimpulan yang bermakna. Namun demikian, jika suatu saat entitas memang harus melakukan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa penjelasan. Entitas wajib mengungkapkannya secara gamblang, lengkap dengan alasan yang melatarbelakangi perubahan serta dampak kuantitatif yang ditimbulkannya, sehingga pengguna laporan tidak mengalami kebingungan dalam menafsirkan informasi yang disajikan.¹¹

d. Tingkat Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyajian Laporan keuangan

Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan pada dasarnya menuntut bahwa setiap angka yang tercantum harus dapat dibuktikan kebenarannya, setiap proses pencatatan harus bisa ditelusuri jejaknya, dan seluruh informasi yang bersifat material wajib disampaikan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi maupun direkayasa. Tuntutan ini menjadi semakin krusial terutama bagi entitas publik dan lembaga pemerintahan, di mana laporan keuangan tidak sekadar berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai wujud nyata pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepada mereka. Dengan menyajikan laporan yang akuntabel dan transparan, kepercayaan masyarakat, investor, maupun pemberi dana terhadap institusi yang bersangkutan dapat terus terpelihara dan diperkuat dari waktu ke waktu.¹²

Dalam kerangka teori ini, penerapan SAK EMKM oleh para pelaku usaha di Kecamatan Suppa dapat dimaknai sebagai cerminan dari ketaatan mereka terhadap standar akuntansi yang telah ditetapkan. Ketaatan tersebut

¹¹ N R Tria, "PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, ESTIMASI," n.d.

¹² Annisa Ningrum, "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan," *Diambil Dari [Http://Ovy19.wordpress.com](http://Ovy19.wordpress.com). Diakses (24 Maret 2022)*, 2010.

tidak bersifat abstrak, melainkan dapat dilihat secara konkret melalui beberapa indikator, yakni sejauh mana laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan ketentuan standar, apakah seluruh komponen laporan telah tersaji secara lengkap, bagaimana konsistensi pencatatan dijalankan dari waktu ke waktu, serta seberapa tinggi tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tercermin dalam laporan keuangan yang dihasilkan.

2. Akuntansi

Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi sehingga memungkinkan pengguna informasi melakukan penilaian serta mengambil keputusan secara tepat. Pandangan ini menunjukkan bahwa akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai media komunikasi yang menyajikan informasi keuangan secara sistematis kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, akuntansi memiliki peran penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengambilan keputusan ekonomi baik di sektor bisnis maupun organisasi lainnya.¹³

Akuntansi pada dasarnya merupakan serangkaian proses yang berjalan secara sistematis, mencakup kegiatan mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, mengolah, hingga menyajikan informasi keuangan dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Informasi yang dihasilkan dari proses tersebut bukan sekadar kumpulan angka, melainkan menjadi landasan penting dalam pengambilan berbagai keputusan ekonomi, baik bagi pemilik usaha yang ingin mengevaluasi perkembangan bisnisnya, investor yang mempertimbangkan penanaman modal, kreditor yang menilai

¹³ S R Soemarso and Akuntansi Suatu Pengantar, "Edisi 5," Jakarta: Salemba Empat, 2009.

kelayakan pemberian pinjaman, maupun berbagai pihak lain yang berkepentingan terhadap kondisi keuangan entitas tersebut.¹⁴

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi keuangan suatu entitas.¹⁵ Sementara itu, menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pencatatan, dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada para pengguna informasi sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.¹⁶

Akuntansi memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap kegiatan usaha karena menjadi dasar dalam mengelola, mengendalikan, dan mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan. Melalui penerapan sistem akuntansi yang baik, setiap transaksi yang terjadi dapat dicatat secara tertib sehingga menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya.

Dalam perspektif Islam, penyusunan laporan keuangan tidak hanya dipandang sebagai proses teknis pencatatan transaksi, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral yang harus dilakukan secara jujur, adil, dan transparan. Informasi keuangan yang disajikan harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya serta terhindar dari segala bentuk manipulasi maupun kecurangan yang dapat merugikan pihak lain.

Allah Swt berfirman dalam QS Al-Muthaffifin (83): 1–3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

¹⁴ Riana Riana, “Penerapan Dan Penyajian Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (Sak Emkm) Pada Ud Tiga Putra” (STIE PGRI Dewantara Jombang, 2023).

¹⁵ Eji Saroji, “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan,” *Jurnal Akuntansi UMMI* 1, no. 2 (2021): 1–9.

¹⁶ Donald E Kieso et al., *Intermediate Accounting, Volume 1* (John Wiley & Sons, 2025).

Terjemahannya:

"Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, tetapi apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi." (QS. Al-Muthaffifin [83]: 1-3).

Ayat tersebut menegaskan larangan melakukan segala bentuk kecurangan dalam aktivitas ekonomi, termasuk mengurangi hak pihak lain melalui penyajian informasi yang tidak benar. Meskipun ayat ini secara langsung membahas takaran dan timbangan dalam perdagangan, para ulama menafsirkannya sebagai prinsip umum yang mengharuskan setiap pelaku usaha berlaku jujur dan adil dalam seluruh transaksi ekonomi. Dalam konteks akuntansi, nilai tersebut diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara objektif, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga informasi yang dihasilkan memiliki tingkat keandalan (*reliability*), dapat dipercaya, dan tidak menyesatkan para penggunanya. Oleh karena itu, penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan penyajian laporan keuangan yang memenuhi prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Informasi tersebut membantu pemilik usaha dalam mengetahui besarnya pendapatan, biaya yang dikeluarkan, laba atau rugi yang diperoleh, serta posisi aset, kewajiban, dan modal yang dimiliki. Dengan demikian, pemilik usaha dapat mengambil keputusan bisnis secara lebih tepat berdasarkan data yang objektif, bukan hanya berdasarkan perkiraan atau pengalaman semata.

Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), keberadaan akuntansi memiliki arti yang sangat penting karena menjadi alat untuk mengontrol perkembangan usaha sekaligus menilai tingkat keberhasilan kegiatan bisnis yang dijalankan. Pencatatan keuangan yang

dilakukan secara teratur memungkinkan pelaku UMKM mengetahui kondisi keuangan usahanya secara lebih jelas, memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, menyusun perencanaan bisnis, serta mengevaluasi kinerja usaha dari waktu ke waktu. Selain itu, laporan keuangan yang disusun dengan baik juga dapat meningkatkan kredibilitas usaha di hadapan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan, investor, maupun pemerintah, terutama ketika pelaku UMKM membutuhkan akses pembiayaan atau mengikuti berbagai program pemberdayaan usaha.

Seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya kebutuhan akan informasi keuangan yang berkualitas, penyusunan laporan keuangan tidak hanya dituntut lengkap, tetapi juga harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Penerapan standar akuntansi bertujuan agar laporan keuangan memiliki karakteristik yang relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan sehingga mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya. Oleh karena itu, bagi pelaku UMKM di Indonesia telah disusun Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang sederhana, namun tetap memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan adanya standar tersebut, diharapkan pelaku UMKM mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat mendukung pengelolaan usaha secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Akuntansi memiliki peranan penting dalam suatu usaha karena dapat memberikan informasi mengenai kondisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan posisi keuangan dalam suatu periode tertentu. Melalui penerapan akuntansi yang baik, pelaku usaha dapat mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh, mengendalikan pengeluaran, serta merencanakan strategi pengembangan usaha di masa yang akan datang.

Secara umum, fungsi akuntansi meliputi:

1. Mencatat seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam kegiatan usaha.
2. Menyediakan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya.
3. Membantu proses pengambilan keputusan ekonomi.
4. Mengetahui kondisi dan perkembangan usaha.
5. Menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Dari pemahaman tersebut, akuntansi sejatinya dapat diposisikan sebagai sebuah sistem informasi yang dirancang untuk menghasilkan data keuangan yang akurat, andal, dan siap digunakan sebagai pijakan dalam mengelola serta mengembangkan usaha ke arah yang lebih baik.

3. Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan merupakan salah satu cabang dalam disiplin akuntansi yang secara khusus berkonsentrasi pada rangkaian kegiatan pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas berbagai transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas. Hasil akhir dari keseluruhan proses tersebut dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik yang berada di dalam lingkungan internal entitas maupun pihak eksternal, sebagai acuan dalam menetapkan berbagai keputusan yang bersifat ekonomis dan strategis.¹⁷

Menurut Warren, Reeve, dan Duchac, akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan informasi keuangan melalui penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Informasi tersebut digunakan oleh pihak-pihak di luar perusahaan untuk menilai kondisi keuangan, kinerja perusahaan, serta

¹⁷ Eni Susilowati et al., *Pengantar Akuntansi* (Basya Media Utama, 2024).

kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban dan menghasilkan keuntungan di masa mendatang.¹⁸

Dalam perspektif Islam, akuntansi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai sistem penyedia informasi ekonomi, tetapi juga merupakan sarana pertanggungjawaban atas pengelolaan harta yang diamanahkan kepada manusia. Informasi keuangan yang disusun harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat serta dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan maupun kepada Allah Swt.

Sejalan dengan hal tersebut, Allah Swt berfirman berfirman dalam QS. Al-Hasyr (59): 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut mengajarkan pentingnya evaluasi dan pertanggungjawaban atas setiap aktivitas yang dilakukan manusia. Dalam konteks akuntansi keuangan, prinsip tersebut tercermin dalam penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun secara jujur, objektif, relevan, dan dapat dipercaya agar mampu memberikan informasi yang berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan tujuan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah

¹⁸ Carl S Warren, James M Reeve, and Jonathan E Duchac, "Financial and Managerial Accounting," (No Title), 2023.

(SAK EMKM), yaitu menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan bermanfaat bagi pengguna informasi.

Akuntansi keuangan pada intinya merupakan suatu proses yang diarahkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di luar organisasi, seperti investor, kreditor, pemerintah, maupun masyarakat luas. Sebagai sebuah bidang kajian, akuntansi keuangan erat kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada prinsip dan standar akuntansi yang telah diakui dan berlaku secara umum.

Tujuan paling mendasar dari akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi yang memadai mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas, di mana informasi tersebut diharapkan benar-benar berguna bagi para pengguna laporan dalam menentukan keputusan-keputusan ekonomi yang tepat. Agar tujuan itu tercapai, informasi yang disajikan harus disusun secara terstruktur dan memenuhi sejumlah kriteria kualitas, yakni relevan dengan kebutuhan pengguna, dapat diandalkan kebenarannya, serta mudah dipahami oleh mereka yang membacanya.¹⁹

Dalam praktiknya, akuntansi keuangan menghasilkan beberapa laporan utama, yaitu:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca), yaitu laporan yang menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas pada suatu periode tertentu.
2. Laporan Laba Rugi, yaitu laporan yang menyajikan pendapatan dan beban selama periode tertentu sehingga menghasilkan laba atau rugi.
3. Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik selama satu periode.

¹⁹ Pristiana Widyastuti, "Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Bidang Jasa," *Journal for Business and Entrepreneurship* 1, no. 1 (2017).

4. Laporan Arus Kas, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan, yaitu penjelasan tambahan mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.²⁰

Bagi UMKM, penerapan akuntansi keuangan sangat penting karena dapat membantu pelaku usaha mengetahui kondisi keuangan usaha secara lebih jelas, mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh, serta memudahkan dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Oleh karena itu, penerapan akuntansi keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan UMKM.

4. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah

SAK EMKM dirancang sebagai standar akuntansi yang diperuntukkan bagi entitas mikro, kecil, dan menengah, yakni entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sesuai definisi SAK ETAP, yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sekurang-kurangnya selama dua tahun berturut-turut. Standar ini juga dapat diterapkan oleh entitas di luar kriteria tersebut apabila otoritas berwenang memberikan izin untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan yang disederhanakan dan disesuaikan dengan kapasitas UMKM, SAK EMKM berlandaskan pada prinsip-prinsip utama sebagai berikut:

1. Standar Pengakuan

Aspek pengakuan (*recognition*) dalam SAK EMKM merupakan proses memasukkan suatu transaksi ke dalam laporan keuangan. Suatu unsur

²⁰ Helmi Herawati, "Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan," *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz* 2, no. 1 (2019): 16–25.

seperti aset, liabilitas, pendapatan, dan beban diakui apabila telah memenuhi definisinya secara jelas serta dapat diukur secara andal. Hal ini berarti tidak semua kejadian dapat dicatat dalam laporan keuangan, melainkan hanya transaksi yang benar-benar memenuhi kriteria dan didukung oleh bukti yang jelas. Sebagai contoh, pendapatan diakui ketika barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan, sedangkan beban diakui pada saat terjadi pengeluaran yang berkaitan dengan aktivitas usaha.²¹

2. Standar Pengukuran

Aspek pengukuran (*measurement*) dalam SAK EMKM merupakan cara untuk menentukan jumlah rupiah yang dicatat dalam laporan keuangan. Dalam standar ini, seluruh transaksi diukur menggunakan kas atau setara kas, yaitu berdasarkan nilai yang benar-benar dibayarkan atau diterima oleh entitas. Dengan demikian, SAK EMKM tidak menggunakan estimasi yang rumit, melainkan berfokus pada transaksi nyata (*real transaction*) yang dapat dibuktikan secara jelas. Sebagai contoh, jika terjadi penjualan tunai sebesar Rp1.000.000, maka transaksi tersebut langsung dicatat dalam laporan keuangan sebesar Rp1.000.000 sesuai dengan jumlah kas yang diterima.²²

3. Standar Penyajian

Aspek penyajian (*presentation*) dalam SAK EMKM berkaitan dengan bagaimana laporan keuangan disusun dan ditampilkan kepada pengguna. Dalam standar ini, penyajian laporan keuangan dibuat secara sederhana dan mudah dipahami, umumnya terdiri dari laporan posisi keuangan yang memuat aset, liabilitas, dan ekuitas, laporan laba rugi yang menunjukkan pendapatan dan beban, serta catatan atas laporan keuangan (CaLK) sebagai

²¹ Natasha Simanjuntak, Tinneke E M Sumual, and Aprili Bacilius, "Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Sak-Emkm: Studi Kasus Pada UMKM Delli Tomohon," *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2020, 35–44.

²² S A K EMKM, "Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Pada UMKM Ud Sari Bunga," *Journal of Accounting* 2, no. 2 (2020): 38–48.

penjelasan tambahan. Penyajian dalam SAK EMKM tidak serumit laporan keuangan pada perusahaan besar, melainkan difokuskan pada informasi utama yang dibutuhkan oleh pengguna. Tujuan dari penyajian yang sederhana ini adalah agar pemilik usaha, kreditur, dan pihak lain dapat dengan mudah memahami kondisi keuangan UMKM.²³

4. Standar Pengungkapan

Aspek pengungkapan (*disclosure*) dalam SAK EMKM merupakan penyampaian informasi tambahan yang bertujuan untuk memperjelas isi laporan keuangan. Dalam standar ini, pengungkapan dilakukan secara ringkas namun tetap relevan, dengan memberikan penjelasan atas hal-hal penting yang tidak terlihat secara langsung dalam laporan utama. Informasi yang diungkapkan dapat meliputi kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian aset atau utang, serta informasi penting lainnya yang mendukung pemahaman laporan keuangan. Tujuan dari pengungkapan ini adalah agar pengguna laporan keuangan tidak salah dalam menafsirkan informasi yang disajikan dan dapat memahami kondisi keuangan entitas secara lebih tepat.²⁴

5. Standar Penilaian

Aspek penilaian (*valuation*) dalam SAK EMKM berkaitan dengan dasar yang digunakan untuk menentukan nilai suatu aset dan liabilitas. Dalam standar ini, penilaian dilakukan menggunakan konsep biaya historis (*historical cost*), yaitu sebesar harga perolehan pada saat aset dibeli atau liabilitas timbul. Hal ini berarti bahwa aset dicatat sesuai dengan harga beli awal dan tidak disesuaikan dengan perubahan harga pasar saat ini, sedangkan liabilitas dicatat sebesar jumlah kewajiban yang harus dibayar. Sebagai contoh, apabila suatu UMKM membeli peralatan seharga Rp5.000.000, maka

²³ Oryza Ayu Devyana, "Perancangan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah: Studi Kasus Pada Apotek Titian Sehat Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

²⁴ I Gusti Ketut Agung Ulupui, Etty Gurendrawati, and Yunika Murdayanti, *Pelaporan Keuangan Dan Praktik Pengungkapan* (Goresan Pena, 2021).

nilai yang dicatat dalam laporan keuangan tetap sebesar Rp5.000.000, meskipun terjadi perubahan nilai pasar di kemudian hari.²⁵

Dalam perspektif Islam, penyusunan laporan keuangan harus dilakukan secara jujur, tepat, dan adil agar informasi yang disampaikan dapat dipercaya oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan SAK EMKM yang mengatur penyajian laporan keuangan secara wajar, andal, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Allah Swt. Berfirman dalam QS. Al-Isra' (17): 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُّوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya:

Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.

Ayat tersebut menegaskan pentingnya kejujuran, ketepatan, dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Meskipun secara tekstual membahas takaran dan timbangan dalam perdagangan, nilai yang terkandung di dalamnya juga menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan. Informasi keuangan harus disajikan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar tidak merugikan pihak lain. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan SAK EMKM, yaitu menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi serta bentuk pertanggungjawaban pelaku UMKM.

SAK EMKM menetapkan tiga jenis laporan keuangan yang wajib disusun oleh entitas yang berada dalam cakupannya, yaitu Laporan Posisi

²⁵ Riky Rizki Junaidi and Ratri Paramitalaksmi, *Buku Referensi Akuntansi Keuangan Menengah* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Berikut penjelasan dari masing-masing laporan tersebut:

- a. Laporan Posisi Keuangan merupakan laporan yang menyajikan nilai dari berbagai pos, meliputi aset lancar, aset tetap, utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal pemilik. Dalam penyusunannya, aset diurutkan berdasarkan tingkat likuiditasnya, sementara utang disusun berdasarkan urutan jatuh temponya.
- b. Laporan Laba Rugi adalah laporan yang memuat nilai-nilai dari pos akun nominal, mencakup pendapatan yang diperoleh serta seluruh beban atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas dalam suatu periode tertentu.
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan memuat pernyataan bahwa laporan keuangan yang disusun telah mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, bagian ini juga menguraikan kebijakan akuntansi yang diterapkan serta memberikan penjelasan lebih rinci atas pos-pos yang belum cukup jelas bila hanya dilihat dari laporan utama.²⁶

5. Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM)

UMKM dapat dipahami sebagai unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dikelola oleh perseorangan maupun badan usaha di berbagai sektor ekonomi. Penggolongan antara usaha mikro, kecil, menengah, dan besar pada umumnya didasarkan pada beberapa indikator, yaitu nilai aset awal di luar tanah dan bangunan, rata-rata omzet tahunan, serta jumlah tenaga kerja tetap. Namun demikian, batasan yang digunakan untuk masing-masing indikator tersebut tidak seragam antarnegara, sehingga perbedaan definisi ini pada akhirnya menjadi

²⁶Risalatul Khamidah, "Implementasi Laporan Keuangan Umkm Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (Sak-Emkm) (Kasus Pada Depo Air Isi Ulang Burdah Water)" (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020).

kendala dalam upaya membandingkan peran dan kontribusi UMKM secara lintas negara secara langsung dan proporsional.²⁷

Dalam perspektif Islam, kegiatan usaha merupakan salah satu bentuk ikhtiar manusia untuk memperoleh rezeki yang halal sekaligus memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Islam mendorong umatnya untuk bekerja, berdagang, dan mengembangkan usaha secara jujur, amanah, serta bertanggung jawab sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Swt. Sejalan dengan hal tersebut, Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha setelah menunaikan kewajiban kepada Allah Swt. Aktivitas ekonomi, termasuk menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), merupakan bentuk ikhtiar dalam memperoleh rezeki yang halal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan UMKM harus dilakukan secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab agar mampu memberikan manfaat bagi pelaku usaha maupun masyarakat secara luas.

UMKM dapat dipahami sebagai unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dikelola oleh perseorangan maupun badan usaha di berbagai sektor ekonomi. Penggolongan antara usaha mikro, kecil, menengah, dan besar pada umumnya didasarkan pada beberapa indikator, yaitu nilai aset awal di luar tanah dan bangunan, rata-rata omzet tahunan, serta jumlah tenaga kerja tetap. Namun demikian, batasan yang digunakan untuk masing-masing indikator tersebut tidak

²⁷ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia...*, hal. 11

seragam antarnegara, sehingga perbedaan definisi ini menjadi kendala dalam upaya membandingkan peran dan kontribusi UMKM secara lintas negara secara langsung dan proporsional. Merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, klasifikasi masing-masing jenis usaha ditetapkan sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha dengan modal usaha sampai paling banyak 1 miliar rupiah di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Usaha Kecil adalah usaha dengan modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah sampai paling banyak 5 miliar rupiah di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Usaha Menengah adalah usaha dengan modal usaha lebih dari 5 miliar rupiah sampai paling banyak 10 miliar rupiah di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dirancang untuk menggambarkan konsep-konsep pokok yang menjadi fokus analisis, yaitu faktor-faktor yang turut mempengaruhi sejauh mana SAK EMKM dapat diterapkan oleh para pelaku UMKM di Kecamatan Suppa. Kerangka ini disusun dengan maksud untuk memperjelas keterkaitan antar variabel yang dikaji, sehingga arah dan alur penelitian dapat dipahami secara lebih sistematis dan terarah.

1. Penerapan SAK EMKM pada UMKM

Tingkat penerapan standar akuntansi keuangan oleh UMKM dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAK EMKM. Variabel ini dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu kesesuaian

laporan keuangan dengan SAK EMKM yang menunjukkan sejauh mana penyusunan laporan telah mengikuti format, pengakuan, dan pengukuran yang sesuai standar, kelengkapan komponen laporan keuangan yang mencerminkan terpenuhinya elemen laporan seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan konsistensi pencatatan keuangan usaha yang menunjukkan penerapan metode pencatatan yang sama dan berkelanjutan dari periode ke periode, serta tingkat akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang menggambarkan kemampuan laporan dalam memberikan informasi yang dapat dipercaya, jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.²⁸

2. Faktor Penghambat Penerapan SAK EMKM

Faktor penghambat merupakan berbagai kendala yang menyebabkan pelaku UMKM belum mampu menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) secara optimal dalam penyusunan laporan keuangan. Faktor penghambat dalam penelitian ini dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam diri pelaku UMKM maupun dari kondisi usaha itu sendiri. Faktor ini dapat memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Indikator faktor internal meliputi:

1. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman akuntansi.
2. Kurangnya pemahaman mengenai SAK EMKM.
3. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan.

²⁸ Rifky Rahadiansyah, "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (Sak Emkm) Pada Umkm Keripik Tempe Rohani Sanan Kota Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

4. Tidak adanya tenaga khusus yang menangani pembukuan.
 5. Rendahnya kesadaran akan pentingnya laporan keuangan.
 6. Kebiasaan mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha.
 7. Keterbatasan waktu dalam melakukan pencatatan keuangan.
- b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar pelaku UMKM yang dapat memengaruhi penerapan SAK EMKM. Faktor ini umumnya berkaitan dengan dukungan lingkungan, lembaga terkait, maupun akses terhadap informasi dan pelatihan. Indikator faktor eksternal meliputi:

1. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai SAK EMKM dari pemerintah atau instansi terkait.
2. Minimnya pendampingan bagi pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan.
3. Terbatasnya akses terhadap informasi akuntansi dan teknologi pencatatan keuangan.
4. Rendahnya dukungan lembaga keuangan dalam memberikan edukasi terkait laporan keuangan.
5. Kurangnya akses terhadap tenaga pendamping atau konsultan akuntansi.

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini berfungsi pada bagaimana penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah, maka kerangka pikir yang digunakan peneliti digambarkan dalam skema berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan utamanya. Pendekatan kualitatif pada dasarnya merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data bersifat deskriptif, di mana informasi yang dihimpun hadir dalam wujud kata-kata dan gambar, bukan deretan angka. Adapun jenis penelitian yang diterapkan adalah analisis isi, yakni sebuah model penelaahan yang berfokus pada dokumen-dokumen berupa teks, gambar, simbol, dan berbagai bentuk representasi lainnya. Melalui pendekatan analisis isi ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang objektif, sistematis, dan relevan mengenai berbagai pesan dan informasi yang disampaikan oleh para informan dalam proses penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke UMKM di Kecamatan Suppa, Desa Wirintasi untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif digunakan karena mampu menggambarkan secara rinci perilaku, persepsi, serta pengalaman pelaku usaha tanpa menggunakan perhitungan statistik, melainkan melalui analisis deskriptif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik usaha, penerapan akuntansi, serta berbagai kendala yang dihadapi UMKM berdasarkan sudut pandang langsung dari pelaku usaha.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di wilayah Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, yaitu mulai 13 Juni 2026 sampai dengan 13 Juli 2026.

C. Fokus Penelitian

Topik ini berfokus pada penelitian tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dan kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam menerapkan SAK EMKM di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan Jenis data yang bersifat deskriptif, data deskriptif adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan gambar bukan angka.²⁹ Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam metode pengumpulan data antara lain observasi, melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan. Bentuk lain dari data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video yang dapat dijadikan sebagai dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data yang kedua dari data yang kita butuhkan, atau data yang di ambil dari kajian pustaka yang ditulis oleh para pakar yang dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah penelitian³⁰. Dalam pembuatan skripsi ini,

²⁹ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.51.

³⁰ Ardial, *Penelitian Komunikasi*. Cet.2, (Jakarta: PT. BumiAksara, 2015).

peneliti mengambil data dari beberapa buku referensi dan data UMKM Kecamatan Suppa, guna untuk memperkuat hasil penelitiain yang dilakukan oleh penelitian.

E. Populasi dan Informan Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Populasi tersebut mencakup berbagai jenis usaha yang masih aktif beroperasi, baik usaha perdagangan, jasa, maupun industri rumah tangga yang termasuk dalam kategori UMKM berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan kedalaman informasi daripada jumlah responden.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaku UMKM yang memiliki usaha di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
2. Usaha telah beroperasi minimal 2 tahun.
3. Pemilik atau pengelola usaha terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan usaha.
4. Bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
5. Memiliki atau pernah melakukan pencatatan keuangan usaha, baik secara sederhana maupun terstruktur.

Berdasarkan kriteria tersebut, informan utama dalam penelitian ini direncanakan sebanyak 8-12 pelaku UMKM yang dianggap dapat memberikan informasi mendalam mengenai penerapan SAK EMKM dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan. Jumlah informan dapat berkembang sesuai

kebutuhan penelitian hingga data yang diperoleh mencapai titik jenuh (*data saturation*).

F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Setiap kegiatan penelitian membutuhkan obyek atau benda. Pengumpulan data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam penelitian dengan pendekatan apapun, pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam melakukan penelitian yang berkualitas.³¹ Adapun Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang di wawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan dengan cara *face to face* atau berhadapan langsung. Wawancara mendalam (*Interview*) yaitu mendapat informasi dengan bertanya secara langsung kepada informan. Dalam proposal ini, penulis melakukan wawancara bebas terpimpin dalam pertanyaan-pertanyaan maupun pernyataan-pernyataan yang sudah tersusun terlebih dahulu yang ditujukan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Suppa untuk memperkuat dan melengkapi data pada penelitian ini.

Metode tanya jawab kepada informan yang dipilih untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan informan. Wawancara yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang lebih dalam dengan melakukan proses penggalian informasi dengan memberikan pertanyaan terbuka terhadap informan yang terkait. Dalam penelitian ini informan yang akan diwawancarai adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Suppa.

³¹ Sudarwin Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2002), h.51.

b. Observasi (*Observation*)

Observasi (*Observation*) yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan menggunakan pengindraan.³² Observasi persepsi atau persepsi adalah prosedur atau metode pengumpulan informasi dengan memperhatikan latihan terus menerus.³³ Teknik observasi adalah dengan cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati secara langsung keadaan lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Observasi dilakukan bertujuan memperoleh data atau gambaran yang akurat dan jelas sesuai dengan kondisi peristiwa di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen kepustakaan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.³⁴ Dokumentasi tidak hanya berupa foto-foto tetapi dokumentasi yang dimaksud dapat berupa gambar, tulisan, buku dan lain-lain. Dengan adanya dokumentasi maka, hasil observasi serta wawancara yang dilakukan akan lebih kredibel atau dapat dipercaya oleh orang lain. Fungsi data dari dokumentasi ini digunakan sebagai bahan pelengkap dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data-data yang diperoleh dari lapangan baik dari sumber, dokumen formal, buku-buku, artikel dan lain

³² Yatim Riyanto, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Penerbit SIC, 2001), h.96

³³ Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2008.)

³⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),

sebagainya. Alasan menggunakan metode dokumentasi ini adalah untuk mendapatkan data-data tentang gambaran penerapan akuntansi pada UMKM Kecamatan Suppa.

2. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian skripsi merupakan tahapan untuk mengelola dan menganalisis data agar dapat menjawab rumusan masalah secara sistematis. Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, proses pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan data yang dianggap relevan dalam penelitian. Pada tahap ini, data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi serta disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga hanya informasi penting yang digunakan untuk analisis lebih lanjut.

b. Kategorisasi

Kategorisasi data merupakan proses mengelompokkan data ke dalam tema atau kategori tertentu agar lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dalam tahap ini, data yang telah direduksi disusun berdasarkan kesamaan makna atau topik, misalnya ke dalam kategori seperti motivasi, hambatan, strategi, dan lain-lain, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lebih lanjut.

c. Koding (*coding*)

Koding (*coding*) merupakan proses pemberian kode atau label pada data untuk memudahkan pengelompokan dan analisis. Dalam tahap ini, setiap data diberi tanda tertentu agar lebih terorganisir, misalnya W1 untuk wawancara informan 1 atau OBS untuk observasi, sehingga peneliti

dapat dengan mudah mengidentifikasi dan mengelompokkan data sesuai kebutuhan penelitian.

Penarikan Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis.

d. Penyajian Data

Penyajian data (*data display*) merupakan proses menyusun data dalam bentuk yang terorganisir, seperti narasi, tabel, bagan, atau matriks. Tujuan dari tahap ini adalah agar data yang telah dikumpulkan menjadi lebih mudah dipahami, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis dan menarik kesimpulan.³⁵

G. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Proses pengujian keabsahan data dalam teknik kualitatif ini menggunakan (Uji *credibility*) kredibilitas data, uji *transferability*, uji *dependability* dan uji *confirmability*.³⁶

Namun pada penelitian yang akan dilakukan hanya menggunakan uji kredibilitas. Dalam uji *credibility* (kredibilitas) data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara:

1. Perpanjangan pengamatan yaitu peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru agar data yang diperoleh dapat benar-benar dipertanggungjawabkan.
2. Peningkatan ketekunan atau kecermatan dalam penelitian yaitu salah satu cara untuk mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat dan disajikan sudah benar atau belum, dilakukan dengan cara membaca

³⁵ Hana Suparti and M Th, *RESEARCH DESIGN: (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif Dalam Penyusunan Tesis Dan Disertasi)* (Dunia Penerbitan buku, 2026).

³⁶ Dedi Susanto and M Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.

berbagai referensi buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh.

3. Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Data ini terdiri dari (Triangulasi sumber, Triangulasi Teknik dan Triangulasi waktu).³⁷

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pendeskripsian dan penyusunan transkrip beserta berbagai material yang telah berhasil dikumpulkan, dengan tujuan agar peneliti dapat memperdalam pemahamannya terhadap data tersebut untuk selanjutnya menyajikannya secara lebih jelas dan sistematis kepada pembaca mengenai temuan-temuan yang diperoleh di lapangan.³⁸

Analisis data pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan yang bergerak dari kebenaran umum menuju pemahaman yang lebih spesifik terhadap suatu fenomena, sekaligus menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada peristiwa atau data lain yang memiliki kemiripan karakteristik dengan fenomena yang sedang dikaji.³⁹ Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian melalui penyederhanaan serta pengabstrakan data yang bersumber dari catatan lapangan, dengan tujuan agar data yang diperoleh menjadi lebih ringkas dan memudahkan penarikan kesimpulan penelitian. Dari keseluruhan data yang telah terkumpul, dilakukan seleksi ulang untuk menentukan data mana yang paling relevan dan tepat untuk digunakan. Peneliti perlu menetapkan fokus

³⁷ Susanto and Jailani.

³⁸ Sudarman Damin, *Mejadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

³⁹ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

penelitian pada hal-hal yang esensial, memilih aspek-aspek pokok, lalu merangkum seluruh data yang diperoleh.

Sejalan dengan berlangsungnya proses pengumpulan data, reduksi data juga melewati beberapa tahap lanjutan, di antaranya pembuatan catatan ringkas yang memuat hal-hal penting. Proses reduksi ini bersifat berkelanjutan dan tidak berhenti setelah kerja lapangan selesai, melainkan terus berlangsung hingga laporan akhir penelitian tersusun secara lengkap.

2. Penyajian Data (*data display*)

Tahap berikutnya dalam kegiatan analisis data adalah penyajian model data. Model dalam konteks ini dipahami sebagai sekumpulan informasi yang telah tersusun secara terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan menentukan langkah tindakan yang tepat. Model tersebut dapat hadir dalam berbagai bentuk, seperti matriks, grafik, jaringan kerja, maupun bagan. Keseluruhan bentuk penyajian itu dirancang dengan tujuan yang sama, yakni mengorganisasikan informasi sedemikian rupa sehingga mudah diakses dan dipahami secara langsung. Dengan demikian, peneliti dapat melihat gambaran yang terjadi secara lebih jelas, merumuskan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta melanjutkan proses ke tahap analisis berikutnya apabila model yang ada memberikan petunjuk atau arahan yang dianggap berguna.

3. Penarikan Kesimpulan

Interpretasi data sangat penting untuk menghasilkan suatu kesimpulan berdasarkan pertanyaan pada saat melakukan penelitian. Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini yaitu berasal dari tahapan yang telah dilalui pada saat proses analisis data. Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, jika telah ditemukan bukti yang kuat dan valid serta konsisten saat peneliti kembali di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

Tabel 3.1 Kisi-kisi Analisis Data Penelitian

Rumusan Masalah	Indikator Data	Sumber Data	Teknik Analisis
Sistem pencatatan laporan keuangan UMKM	Pencatatan penjualan, pemasukan, pengeluaran, biaya, utang, piutang, aset, modal, dan bukti transaksi	Wawancara, observasi, dokumentasi	Reduksi data dan kategorisasi praktik pencatatan
Kesesuaian dengan SAK EMKM	Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan	Wawancara dan dokumen pencatatan usaha	Matriks kesesuaian dengan SAK EMKM
Kendala penerapan SAK EMKM	Pengetahuan, kebiasaan pencatatan, SDM, waktu, pelatihan, pendampingan, dan akses informasi	Wawancara informan	Koding tematik kendala internal dan eksternal

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kecamatan Suppa merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi usaha masyarakat pada berbagai bidang, seperti perdagangan, jasa, pertanian, perikanan, peternakan, dan kuliner. UMKM di wilayah ini berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dan menjadi sumber pendapatan bagi pemilik usaha serta tenaga kerja yang terlibat di dalamnya.

Data UMKM Kecamatan Suppa tahun 2026 yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan terdapat 660 UMKM yang tersebar di sepuluh desa/kelurahan. Sebaran UMKM tersebut menjadi gambaran awal bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kecamatan Suppa cukup beragam dan potensial. Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang lebih tertib agar pelaku usaha dapat mengetahui kondisi usaha secara akurat dan memiliki laporan yang dapat digunakan untuk akses pembiayaan.

Tabel 4.1 Jumlah UMKM Kecamatan Suppa Tahun 2026

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah UMKM	Persentase
1	Desa Lero	151	22.88%
2	Desa Ujung Labuang	17	2.58%
3	Desa Wiring Tasi	11	1.67%
4	Desa Tasiwalie	79	11.97%
5	Desa Maritengngae	69	10.45%
6	Desa Lotang Salo	14	2.12%
7	Desa Polewali	19	2.88%
8	Desa Wattang Pulu	24	3.64%
9	Kelurahan Tellumpanua	200	30.30%
10	Kelurahan Watang Suppa	76	11.52%
	Jumlah	660	100,00%

Sumber: Data Pemerintah Kec. Suppa

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar di Kecamatan Suppa pada tahun 2026 berbeda-beda di setiap desa maupun kelurahan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat perkembangan kegiatan usaha pada masing-masing wilayah tidak sama. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain jumlah penduduk, potensi sumber daya yang dimiliki, tingkat aktivitas ekonomi masyarakat, serta karakteristik wilayah yang berbeda.

Data tersebut memperlihatkan bahwa beberapa desa atau kelurahan memiliki jumlah UMKM yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah tersebut memiliki aktivitas ekonomi yang relatif lebih berkembang sehingga mampu mendorong tumbuhnya lebih banyak pelaku usaha. Sebaliknya, wilayah dengan jumlah UMKM yang masih rendah memerlukan perhatian melalui pembinaan dan pendampingan agar mampu meningkatkan kapasitas serta daya saing usahanya.

Keberadaan UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Suppa menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung perekonomian masyarakat. Meskipun demikian, peningkatan jumlah UMKM perlu diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang baik, khususnya dalam hal pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Penerapan pencatatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) diharapkan dapat menghasilkan informasi keuangan yang lebih akurat, mudah dipahami, serta bermanfaat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan usaha.

Oleh karena itu, data pada tabel diatas memberikan gambaran mengenai kondisi umum UMKM di Kecamatan Suppa sekaligus menjadi dasar dalam penentuan informan penelitian. Informasi tersebut juga menunjukkan bahwa penelitian mengenai penerapan SAK EMKM menjadi penting untuk mengetahui bagaimana praktik pencatatan keuangan yang dilakukan oleh pelaku UMKM serta sejauh mana kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku.

B. Hasil Penelitian

Informan penelitian terdiri atas delapan pelaku UMKM yang menjalankan usaha pada bidang perikanan, perdagangan, jasa, kuliner, depot air minum, dan pangkalan gas. Informan dipilih karena terlibat langsung dalam pengelolaan usaha dan mampu memberikan informasi mengenai praktik pencatatan keuangan. Profil informan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Profil Informan Penelitian

Kode	Jenis Usaha	Lama Usaha	Tenaga Kerja	Omzet/Bulan	Izin	Modal
I.1	Udang dan ikan bandeng	2 tahun	2	Rp6.000.000-Rp10.000.000	Tidak ada	Modal pribadi
I.2	Bensin eceran	3 tahun	2	Rp2.000.000-Rp4.000.000	Tidak ada	Pinjaman koperasi
I.3	Depot air minum isi ulang	6 tahun	3	Rp14.400.000	Memiliki izin	Pinjaman bank
I.4	Perdagangan telur ayam ras	±10 tahun	6	Rp252.000.000	Memiliki izin	Pinjaman bank
I.5	Perdagangan telur ayam ras	±8 tahun	5	Rp123.840.000	Memiliki izin	Pinjaman bank
I.6	Perdagangan telur ayam ras	±7 tahun	5	Rp92.880.000	Memiliki izin	Pinjaman bank
I.7	Makanan dan minuman	2 tahun	1	Rp6.500.000-Rp7.800.000	Tidak ada	Modal pribadi
I.8	Penyaluran gas LPG 3 kg	10 tahun	2	Rp5.600.000	Memiliki izin	Modal pribadi

Pada tabel di atas disajikan profil informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti, seperti memiliki usaha yang masih aktif, menjalankan usahanya secara mandiri, serta bersedia memberikan informasi mengenai praktik pencatatan dan pelaporan keuangan yang diterapkan dalam kegiatan usahanya.

Keberagaman karakteristik pelaku UMKM memberikan gambaran mengenai kondisi pelaku UMKM di Kecamatan Suppa. Perbedaan jenis usaha, lama menjalankan usaha, maupun latar belakang masing-masing informan memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih beragam terkait penerapan pencatatan keuangan

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

Selain itu, profil pelaku UMKM tersebut menunjukkan bahwa setiap pelaku UMKM memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan yang berbeda dalam mengelola administrasi keuangan usahanya. Perbedaan karakteristik tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman serta penerapan SAK EMKM dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan.

Dengan demikian, informasi yang disajikan pada tabel di atas memberikan gambaran mengenai karakteristik informan yang menjadi objek penelitian. Data tersebut menjadi landasan penting dalam menganalisis penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Suppa sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

1. Sistem Pencatatan Laporan Keuangan pada UMKM di Kecamatan Suppa

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem pencatatan keuangan UMKM di Kecamatan Suppa belum dilakukan secara terstruktur. Sebagian besar pelaku UMKM tidak melakukan pencatatan keuangan usaha, sedangkan sebagian besar lainnya hanya melakukan pencatatan sederhana. Pencatatan sederhana tersebut umumnya terbatas pada jumlah barang terjual, hasil penjualan, atau catatan pelanggan yang masih memiliki tanggungan pembayaran. Tidak ada pelaku UMKM yang mencatat seluruh biaya usaha secara lengkap.

Tabel 4.3 Ringkasan Sistem Pencatatan Keuangan Informan

Kode	Nama Informan	Status Pencatatan	Transaksi yang Dicatat	Biaya Usaha	Laporan Berkala
I.1	Ibu Suriyani	Tidak mencatat	Tidak ada; hanya menyimpan nota penjualan	Tidak dicatat	Tidak menyusun
I.2	Ibu Rohani	Sederhana	Jumlah bensin terjual dan uang hasil penjualan	Tidak lengkap	Tidak menyusun
I.3	Yusuf	Sederhana	Jumlah galon diambil/diantar dan piutang pelanggan	Tidak rinci	Tidak menyusun
I.4	Dirwan	Tidak	Tidak ada transaksi yang dicatat	Tidak rinci	Tidak menyusun

	Burhan	mencatat	khusus		
I.5	Adama	Tidak mencatat	Tidak ada pencatatan teratur	Tidak dicatat	Tidak menyusun
I.6	Alimin	Tidak mencatat	Tidak ada pencatatan khusus	Tidak rinci	Tidak menyusun
I.7	Murti Novianti	Sederhana	Uang hasil penjualan setelah berjualan	Tidak rutin	Tidak menyusun
I.8	Amir	Tidak mencatat	Data pelanggan untuk pangkalan, bukan pencatatan keuangan	Tidak dicatat	Tidak menyusun

Sumber: Hasil wawancara pelaku UMKM Kecamatan Suppa Tahun 2026

Pada tabel di atas disajikan ringkasan mengenai sistem pencatatan keuangan yang diterapkan oleh masing-masing pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Data tersebut memberikan gambaran mengenai praktik pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pelaku UMKM, mulai dari bentuk pencatatan yang digunakan hingga kelengkapan informasi keuangan yang disusun dalam kegiatan usahanya.

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa sistem pencatatan keuangan yang diterapkan oleh para pelaku UMKM masih beragam. Sebagian pelaku UMKM telah melakukan pencatatan terhadap transaksi usahanya, namun pencatatan tersebut umumnya masih bersifat sederhana dan belum disusun sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Di sisi lain, masih terdapat pelaku UMKM yang belum melakukan pencatatan secara lengkap sehingga kondisi keuangan usahanya belum terdokumentasi dengan baik.

Hasil tersebut sejalan dengan pernyataan beberapa pelaku UMKM.

I.1: "Tidak, saya tidak melakukan pencatatan keuangan. Saya hanya menyimpan nota penjualan dari pembeli."

I.4: "Tidak ada pencatatan khusus mengenai transaksi usaha, saya hanya menjalankan usaha seperti biasa."

I.5: "Saya tidak pernah membuat catatan keuangan, karena menurut saya usaha masih kecil dan masih bisa diingat."

Ketiga pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM belum menganggap pencatatan keuangan sebagai bagian penting dalam pengelolaan usaha sehingga aktivitas pencatatan belum dilakukan secara rutin.

Perbedaan sistem pencatatan keuangan yang diterapkan oleh para pelaku UMKM menunjukkan adanya variasi tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan keuangan dalam menjalankan usaha. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, pengalaman berusaha, keterbatasan pengetahuan mengenai akuntansi, serta anggapan bahwa proses pencatatan keuangan memerlukan waktu dan dianggap cukup rumit untuk diterapkan.

Dengan demikian, informasi yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa penerapan sistem pencatatan keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Suppa masih perlu ditingkatkan melalui pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong para pelaku UMKM untuk menyusun pencatatan keuangan yang lebih tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan SAK EMKM sehingga informasi keuangan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta pengembangan usaha di masa mendatang.

Wawancara berikut menunjukkan kondisi pencatatan keuangan pelaku UMKM:

- I.1: *“Tidak, saya tidak melakukan pencatatan keuangan. Saya hanya menyimpan nota penjualan dari pembeli.”*⁴⁰
- I.2: *“Saya hanya mencatat jumlah bensin yang terjual dan uang hasil penjualan.”*⁴¹
- I.3: *“Pencatatan hanya dilakukan untuk mengetahui jumlah galon yang diantar kepada pelanggan.”*⁴²
- I.7: *“Saya hanya menghitung hasil penjualan dan memperkirakan keuntungan yang diperoleh.”*⁴³

⁴⁰ Ibu Suriyani, Pelaku UMKM Budidaya Udang dan Ikan Bandeng_Wawancara 13 Juni 2026

⁴¹ Ibu Rohani, Pelaku UMKM Jual Besnsin Eceran_ Wawancara 13 Juni 2026

⁴² Yusuf, Pelaku UMKM Depot Air Minum Isi Ulang_ Wawancara 13 Juni 2026

⁴³ Murti Novianti, Pelaku UMKM Penjual Makanan dan Minuman di Kantin Sekolah_ Wawancara 14 Juni 2026

Berdasarkan kutipan tersebut, pencatatan yang dilakukan pelaku UMKM masih berorientasi pada kebutuhan operasional harian. Pelaku UMKM mencatat hal yang dianggap langsung berkaitan dengan transaksi penjualan, tetapi belum mencatat seluruh elemen yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM belum memiliki informasi keuangan yang lengkap untuk mengetahui posisi aset, utang, modal, pendapatan, beban, dan laba bersih secara akurat.

2. Kesesuaian Laporan Keuangan UMKM dengan SAK EMKM

SAK EMKM mensyaratkan laporan keuangan minimum berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pelaku UMKM yang menyusun ketiga komponen laporan tersebut. Sebagian pelaku UMKM bahkan belum mengetahui SAK EMKM, sedangkan pelaku UMKM yang pernah mengetahui SAK EMKM saat kuliah belum menerapkannya dalam usaha. Praktik pencatatan dan pelaporan keuangan UMKM yang diteliti belum sesuai dengan SAK EMKM.

Tabel 4.4 Matriks Kesesuaian Praktik UMKM dengan SAK EMKM

Aspek SAK EMKM	Indikator	Temuan pada Informan	Status Kesesuaian
Pengakuan	Transaksi pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan ekuitas diakui ketika terjadi dan dapat diukur andal.	Pendapatan sebagian dicatat oleh tiga informan; beban, aset, liabilitas, dan ekuitas tidak dicatat lengkap.	Belum sesuai
Pengukuran	Aset dan liabilitas diukur berdasarkan biaya historis.	Tidak ada informan yang menyusun daftar aset, utang, dan modal secara sistematis.	Belum sesuai
Penyajian laporan	Menyajikan aset,	Tidak ada	Tidak sesuai

posisi keuangan	liabilitas, dan ekuitas.	informan yang menyusun laporan posisi keuangan.	
Penyajian laporan laba rugi	Menyajikan pendapatan dan beban untuk menentukan laba/rugi.	Informan hanya memperkirakan keuntungan; tidak ada laporan laba rugi formal.	Tidak sesuai
Catatan atas laporan keuangan	Memuat pernyataan kepatuhan dan kebijakan akuntansi ringkas.	Tidak ada informan yang menyusun catatan atas laporan keuangan.	Tidak sesuai
Pengungkapan	Informasi penting diungkap agar laporan dapat dipahami.	Tidak ada pengungkapan kebijakan, rincian aset, utang, modal, atau beban.	Tidak sesuai

Sumber: Data diolah Peneliti, 2026

Pada tabel di atas disajikan hasil analisis mengenai tingkat kesesuaian praktik pencatatan keuangan yang dilakukan oleh para pelaku UMKM dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Matriks tersebut menggambarkan sejauh mana pencatatan keuangan yang diterapkan telah memenuhi komponen-komponen yang dipersyaratkan dalam SAK EMKM, mulai dari proses pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum sepenuhnya menerapkan pencatatan keuangan sesuai dengan ketentuan SAK EMKM. Pencatatan yang dilakukan masih bersifat sederhana dan umumnya hanya berfokus pada pencatatan penerimaan serta pengeluaran kas, tanpa disertai penyusunan laporan keuangan yang lengkap sebagaimana diatur dalam standar akuntansi yang berlaku.

Temuan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan beberapa pelaku UKMM

I.8: "Tidak pernah, saya tidak pernah membuat laporan keuangan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan belum menjadi bagian dari pengelolaan usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Informasi keuangan hanya diketahui berdasarkan hasil penjualan yang diterima setiap hari tanpa disusun dalam bentuk laporan keuangan sesuai standar akuntansi.

I.7: "Saya hanya menghitung hasil penjualan dan memperkirakan keuntungan yang diperoleh."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa laba usaha masih dihitung berdasarkan perkiraan pemilik usaha, bukan melalui penyusunan laporan laba rugi sebagaimana diatur dalam SAK EMKM.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek dalam SAK EMKM yang belum diterapkan oleh para pelaku UMKM, seperti penyusunan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, maupun catatan atas laporan keuangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan standar akuntansi pada UMKM masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi pengetahuan, pemahaman, maupun kemampuan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis ketentuan SAK EMKM, ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat pada setiap komponen laporan keuangan.

1. Pada aspek pengakuan (*recognition*), sebagian besar pelaku UMKM hanya mengakui pendapatan dari hasil penjualan, sedangkan transaksi lain seperti beban operasional, aset usaha, kewajiban, dan modal belum dicatat secara lengkap. Padahal, SAK EMKM mengharuskan seluruh unsur tersebut diakui ketika memenuhi definisi dan dapat diukur secara andal sehingga mampu menggambarkan kondisi keuangan usaha secara menyeluruh.
2. Pada aspek pengukuran (*measurement*), SAK EMKM menggunakan dasar biaya historis (*historical cost*) dalam mengukur aset dan liabilitas. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada informan yang memiliki daftar aset usaha maupun pencatatan utang dan modal secara sistematis. Akibatnya, nilai kekayaan usaha tidak dapat diketahui secara akurat.

3. Pada aspek penyajian (*presentation*), seluruh informan belum menyusun laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi sesuai format yang ditetapkan dalam SAK EMKM. Kondisi ini menyebabkan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban belum dapat disajikan secara lengkap kepada pemilik usaha maupun pihak lain yang membutuhkan informasi keuangan.
4. Aspek pengungkapan (*disclosure*), tidak satu pun pelaku UMKM menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Padahal, CaLK merupakan bagian penting dalam SAK EMKM karena memuat kebijakan akuntansi yang digunakan serta informasi tambahan yang diperlukan agar laporan keuangan mudah dipahami oleh pengguna. Berdasarkan empat aspek utama tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pencatatan dan pelaporan keuangan UMKM di Kecamatan Suppa masih belum memenuhi ketentuan SAK EMKM secara menyeluruh.

Dengan demikian, informasi yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pencatatan keuangan pelaku UMKM dengan SAK EMKM masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan, pendampingan, serta edukasi yang berkelanjutan agar para pelaku UMKM memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya penerapan SAK EMKM sehingga mampu menyusun laporan keuangan yang lebih tertib, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Temuan mengenai pengetahuan SAK EMKM juga menunjukkan bahwa sebagian besar informan belum pernah mendengar SAK EMKM. Sebagian besar informan lainnya pernah mengetahui SAK EMKM saat kuliah, tetapi keduanya belum menerapkan standar tersebut dalam usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan awal belum cukup untuk mendorong penerapan apabila tidak diikuti kebiasaan pencatatan, format laporan yang mudah digunakan, dan pendampingan teknis.

Kutipan wawancara berikut memperjelas kondisi pengetahuan SAK EMKM dan penyusunan laporan keuangan:

I.4: *“Ya, saya pernah mendengar dan mempelajari SAK EMKM ketika masih kuliah.”*⁴⁴

I.7: *“Ya, saya pernah mengetahui dan mempelajari SAK EMKM saat masih kuliah, tetapi belum pernah menerapkannya dalam usaha yang saya jalankan.”*⁴⁵

I.6: *“Saya belum pernah mendengar mengenai SAK EMKM.”*⁴⁶

I.8: *“Tidak pernah, saya tidak pernah membuat laporan keuangan.”*⁴⁷

3. Kendala yang Dihadapi Pelaku UMKM dalam Menerapkan SAK EMKM

Kendala penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Suppa dapat dikelompokkan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi belum memahami cara mencatat dan menyusun laporan keuangan, belum terbiasa membuat laporan, menjalankan usaha berdasarkan perputaran kas harian, serta tidak adanya tenaga khusus pembukuan. Faktor eksternal meliputi belum adanya pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi SAK EMKM yang diterima oleh sebagian besar pelaku UMKM.

Tabel 4.5 Kode Tematik Kendala Penerapan SAK EMKM

Kode Tema	Jenis Kendala	Bentuk Temuan	Informan Terkait
K1	Pemahaman akuntansi rendah	Belum memahami cara mencatat dan membuat laporan keuangan.	I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, I.8
K2	Tidak mengetahui SAK EMKM	Belum pernah mendengar SAK EMKM.	I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, I.8
K3	Kebiasaan informal	Usaha berjalan berdasarkan perputaran kas dan ingatan.	I.4, I.5, I.6

⁴⁴ Dirwan Burhan, Pelaku UMKM Perdagangan Telur Ayam Ras_Wawancara 13 Juni 2026.

⁴⁵ Murti Novianti, Pelaku UMKM Penjual Makanan dan Minuman di Kantin Sekolah_Wawancara 14 Juni 2026

⁴⁶ Alimin, Pelaku UMKM Perdagangan Telur Ayam Ras_Wawancara 13 Juni 2026.

⁴⁷ Amir, Pelaku UMKM Penyaluran Gas LPG 3 Kg_Wawancara 14 Juni 2026.

K4	Belum terbiasa membuat laporan	Mengetahui manfaat pencatatan, tetapi belum rutin dan belum mampu menyusun laporan.	I.7
K5	Tidak ada pendampingan	Belum pernah mendapat pelatihan atau sosialisasi praktis.	I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, I.7, I.8
K6	Kebutuhan pelatihan sederhana	Informan menginginkan pelatihan dan pendampingan yang mudah dipahami.	Seluruh informan

Sumber: Data diolah Peneliti, 2026

Pada tabel di atas disajikan hasil pengelompokan data mengenai berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Kode tematik tersebut disusun berdasarkan hasil wawancara yang telah dianalisis sehingga menghasilkan beberapa tema utama yang menggambarkan faktor-faktor penghambat dalam penerapan SAK EMKM pada kegiatan usaha.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa kendala yang dialami oleh para pelaku UMKM tidak hanya berasal dari aspek teknis pencatatan keuangan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan mengenai akuntansi, rendahnya pemahaman terhadap ketentuan SAK EMKM, minimnya pelatihan atau pendampingan, serta keterbatasan waktu dalam melakukan pencatatan transaksi secara rutin. Berbagai kendala tersebut menyebabkan sebagian besar pelaku UMKM belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

Selain itu, hasil pengkodean tematik menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM masih menganggap pencatatan keuangan sebagai kegiatan yang rumit dan belum menjadi prioritas dalam pengelolaan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi tersebut masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya penerapan SAK EMKM, karena pelaku UMKM cenderung lebih memusatkan perhatian pada kegiatan operasional usaha dibandingkan penyusunan administrasi

keuangan yang sesuai standar. Kondisi tersebut berdampak pada masih sederhananya sistem pencatatan yang diterapkan, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan belum dapat menggambarkan kondisi usaha secara menyeluruh.

Dengan demikian, informasi yang disajikan pada tabel di atas memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kecamatan Suppa. Temuan ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih intensif melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan secara berkelanjutan agar para pelaku UMKM memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai dalam menerapkan SAK EMKM, sehingga dapat menyusun laporan keuangan yang lebih baik, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Kutipan wawancara yang mewakili kendala pelaku UKM adalah sebagai berikut:

I.1: *“Saya belum memahami cara mencatat dan membuat laporan keuangan.”*⁴⁸

I.6: *“Kendalanya karena saya belum memahami cara menyusun laporan keuangan dan belum pernah belajar secara khusus mengenai hal tersebut.”*⁴⁹

I.4: *“Namun, saya lebih nyaman menjalankan usaha dengan cara yang selama ini dilakukan tanpa pencatatan keuangan formal.”*⁵⁰

I.7: *“Kendalanya lebih karena saya belum terbiasa membuat laporan keuangan.”*⁵¹

I.8: *“Belum pernah. Kalau ada pelatihan, saya bersedia ikut.”*⁵²

⁴⁸ Ibu Suriyani, Pelaku UMKM Budidaya Udang dan Ikan Bandeng_Wawancara 13 Juni 2026

⁴⁹ Alimin, Pelaku UMKM Perdagangan Telur Ayam Ras_Wawancara 13 Juni 2026.

⁵⁰ Dirwan Burhan, Pelaku UMKM Perdagangan Telur Ayam Ras_Wawancara 13 Juni 2026.

⁵¹ Murti Novianti, Pelaku UMKM Penjual Makanan dan Minuman di Kantin Sekolah_Wawancara 14 Juni 2026

⁵² Amir, Pelaku UMKM Penyaluran Gas LPG 3 Kg_Wawancara 14 Juni 2026.

C. Pembahasan

1. Sistem Pencatatan Laporan Keuangan UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencatatan keuangan UMKM di Kecamatan Suppa masih berada pada tahap pencatatan sangat sederhana. Sebagian pelaku UMKM tidak melakukan pencatatan keuangan, sedangkan sebagian lainnya hanya mencatat hal-hal yang berhubungan langsung dengan penjualan atau jumlah barang yang diserahkan kepada pelanggan. Temuan ini mendukung hasil penelitian Sulvi Shafira Amalia yang menyatakan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami secara baik konsep dan penerapan SAK EMKM, sehingga pencatatan keuangan yang dilakukan masih bersifat sederhana dan belum memenuhi komponen laporan keuangan sesuai standar yang berlaku.⁵³ Temuan ini juga sejalan dengan Indah Reski Amelia yang menemukan bahwa sebagian besar pengelola UMKM belum memahami secara optimal penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM sehingga pencatatan yang dilakukan masih sederhana dan belum sesuai standar.⁵⁴

Apabila ditinjau berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pencatatan keuangan para pelaku UMKM belum memenuhi konsep dasar akuntansi. SAK EMKM mengatur bahwa setiap transaksi keuangan yang terjadi harus dicatat secara sistematis agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang relevan, andal, serta dapat digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Pencatatan yang hanya berfokus pada penerimaan kas atau penjualan tidak mampu memberikan gambaran mengenai

⁵³ Amalia, "Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis Sak-Emkm Di Parepare (Analisis Akuntansi Syariah) 2022."

⁵⁴ Indah Reski Amelia, "Persepsi Pengelola Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis Sak Emkm Di Kecamatan Panca Rijang," 2025.

keseluruhan kondisi usaha karena belum mencakup informasi mengenai aset, kewajiban, modal, maupun beban usaha.

Selain itu, pencatatan yang tidak dilakukan secara rutin menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengetahui keuntungan usaha yang sebenarnya. Sebagian besar pelaku usaha hanya memperkirakan keuntungan berdasarkan sisa uang yang tersedia tanpa melakukan perhitungan biaya produksi maupun beban operasional secara lengkap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi akuntansi sebagai alat pengendalian usaha belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan ketentuan SAK EMKM, proses pencatatan merupakan tahap awal yang sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, apabila pencatatan transaksi belum dilakukan secara benar, maka laporan keuangan yang dihasilkan juga tidak akan memenuhi standar akuntansi yang berlaku.

Pencatatan yang dilakukan pelaku UMKM belum mencakup keseluruhan transaksi usaha. Pelaku UMKM I hanya mencatat jumlah barang yang terjual dan hasil penjualan, mencatat jumlah galon yang diantar dan tanggungan pelanggan, atau sekadar menghitung hasil penjualan setelah kegiatan usaha selesai. Pola ini serupa dengan temuan Dewi Asnita yang menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun pelaku usaha masih sederhana dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku karena keterbatasan pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan.⁵⁵ Temuan ini juga didukung oleh Nurhayati yang menemukan bahwa sebagian besar UMKM telah melakukan pencatatan keuangan, namun

⁵⁵ Asnita, "Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Laporan Keuangan Toko Rezky Sidenreng Rappang."

belum menerapkan penyusunan laporan keuangan secara lengkap sesuai standar yang berlaku.⁵⁶

Temuan menarik penelitian ini adalah tingkat omzet tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pencatatan keuangan. Pelaku UMKM dengan omzet relatif besar tetap tidak melakukan pencatatan keuangan formal. Temuan ini menunjukkan bahwa ukuran usaha bukan satu-satunya faktor yang menentukan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya pencatatan keuangan masih menjadi faktor yang lebih dominan dalam mendorong penerapan laporan keuangan yang sesuai standar.

2. Kesesuaian dengan SAK EMKM

Kendala penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Suppa dapat dikelompokkan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi belum memahami cara mencatat dan menyusun laporan keuangan, belum terbiasa membuat laporan, menjalankan usaha berdasarkan perputaran kas harian, serta tidak adanya tenaga khusus pembukuan. Faktor eksternal meliputi belum adanya pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi SAK EMKM yang diterima oleh sebagian besar pelaku UMKM.

Temuan ini sejalan dengan Teori Kepatuhan, yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap suatu aturan dapat dilihat dari tingkat kesesuaian perilaku seseorang dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, standar yang dimaksud adalah SAK EMKM sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan UMKM. Karena sebagian besar pelaku UMKM belum mampu menyusun laporan sesuai ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan terhadap SAK EMKM masih rendah.

⁵⁶ Nurhayati, "Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Laporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang."

Selain itu, teori kepatuhan juga menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh adanya pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai komponen laporan keuangan menyebabkan mereka belum mampu menerapkan standar secara optimal. Oleh karena itu, kesesuaian laporan keuangan dengan SAK EMKM belum dapat diwujudkan secara maksimal.

Rendahnya pengetahuan mengenai SAK EMKM menjadi faktor penting dalam ketidaksesuaian laporan keuangan. Sebagian besar pelaku UMKM belum pernah mendengar SAK EMKM, sedangkan pelaku UMKM yang telah mengetahui standar tersebut, misalnya melalui pembelajaran sangat menempuh pendidikan, juga belum menerapkannya dalam kegiatan usaha. Temuan ini mendukung hasil penelitian Sulvi Shafira Amalia yang menyatakan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami konsep dan penerapan SAK EMKM. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Indah Reski Amelia yang menunjukkan bahwa pemahaman pengelola UMKM terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM masih rendah sehingga belum mampu diterapkan secara optimal dalam kegiatan usaha.⁵⁷

Hasil penelitian ini berbeda dengan Firda Azis yang menemukan bahwa penerapan SAK EMKM pada Toko Nur Rappang mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan karena pencatatan menjadi lebih sistematis dan terstruktur.⁵⁸ Pada UMKM di Kecamatan Suppa, tidak ada informan yang menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM, bahkan sebagian besar belum mengetahui standar tersebut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan SAK EMKM sangat dipengaruhi oleh pemahaman pelaku usaha, kesiapan teknis, dan kondisi masing-masing usaha.

⁵⁷ Indah Reski Amelia, "Persepsi Pengelola Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis Sak Emkm Di Kecamatan Panca Rijang," 2025.

⁵⁸ Firda Azis, "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Emkm Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada Toko Nur Rappang," 2024.

Ketidaksesuaian laporan keuangan UMKM Suppa dengan SAK EMKM terlihat dari tidak adanya pengakuan dan pengukuran transaksi secara lengkap. Pendapatan sebagian dicatat, tetapi beban, aset, kewajiban, dan modal tidak dicatat secara sistematis. Temuan ini mendukung penelitian Indah Reski Amelia yang menyatakan bahwa pencatatan keuangan UMKM masih sederhana dan belum sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian Nurhayati juga menunjukkan bahwa pencatatan keuangan yang dilakukan UMKM belum disusun secara lengkap sesuai ketentuan laporan keuangan yang seharusnya.⁵⁹

3. Kendala Penerapan SAK EMKM

Kendala internal yang paling dominan adalah rendahnya pemahaman akuntansi dan belum terbiasanya pelaku usaha membuat laporan keuangan. Sebagian pelaku usaha menganggap pencatatan formal tidak mendesak karena transaksi usaha berjalan secara tunai dan uang hasil penjualan langsung diputar kembali untuk kebutuhan usaha. Temuan ini mendukung hasil penelitian Sulvi Shafira Amalia yang menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan akuntansi dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM.⁶⁰ Temuan ini juga sejalan dengan Dewi Asnita yang menemukan bahwa keterbatasan pemahaman pemilik usaha menyebabkan laporan keuangan yang disusun belum sesuai standar.⁶¹

Kendala eksternal yang ditemukan adalah belum adanya pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan praktis mengenai pencatatan keuangan maupun SAK EMKM. Hampir seluruh pelaku UMKM menyatakan belum pernah

⁵⁹ Nurhayati, "Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Laporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang," 2023.

⁶⁰ Amalia, "Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis Sak-Emkm Di Parepare (Analisis Akuntansi Syariah) 2022"

⁶¹ Asnita, "Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Laporan Keuangan Toko Rezky Sidenreng Rappang."

mengikuti pelatihan, tetapi bersedia jika ada kegiatan yang sederhana dan mudah dipahami. Temuan ini mendukung penelitian Sulvi Shafira Amalia yang menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi mengenai SAK EMKM menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya penerapan standar tersebut.⁶² Hasil ini juga sejalan dengan Firda Azis yang menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM dapat memberikan manfaat bagi kualitas laporan keuangan apabila pelaku usaha memperoleh pemahaman dan penerapan yang memadai.⁶³

Rekomendasi pelatihan bagi UMKM Suppa perlu diarahkan pada pencatatan sederhana yang langsung dapat dipakai dalam aktivitas harian, seperti buku kas masuk, buku kas keluar, catatan utang-piutang, daftar aset, dan rekap laba rugi bulanan. Pendekatan praktis ini penting agar pelaku usaha dapat memahami manfaat pencatatan keuangan secara langsung dan bertahap menuju penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Upaya tersebut sejalan dengan hasil penelitian Firda Azis yang menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pencatatan yang lebih sistematis dan terstruktur.⁶⁴

Berdasarkan teori kepatuhan, rendahnya penerapan SAK EMKM pada UMKM Suppa bukan semata-mata karena pelaku usaha menolak aturan, tetapi karena standar belum dipahami, belum menjadi kebiasaan, dan belum didukung oleh sistem pendampingan yang memadai. Temuan ini sejalan dengan Sulvi Shafira Amalia yang menemukan bahwa rendahnya pemahaman dan minimnya sosialisasi menjadi faktor utama belum diterapkannya SAK

⁶² Sulvi Shafira Amalia, "Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis Sak-Emkm Di Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)," 2022.

⁶³ Firda Azis, "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Emkm Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada Toko Nur Rappang," 2024.

⁶⁴ Firda Azis, "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Emkm Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada Toko Nur Rappang," 2024.

EMKM pada UMKM.⁶⁵ Selain itu, hasil penelitian Indah Reski Amelia juga menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman pelaku usaha masih menjadi kendala dalam penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM.⁶⁶

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan SAK EMKM tidak hanya bergantung pada kemampuan pelaku usaha, tetapi juga memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi akuntansi, serta lembaga pendamping UMKM melalui kegiatan edukasi, pelatihan, dan pembinaan yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya pemahaman mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan sesuai SAK EMKM, diharapkan kualitas laporan keuangan UMKM juga akan meningkat sehingga mampu mendukung pengembangan usaha dan memperluas akses terhadap sumber pembiayaan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris bahwa penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Suppa masih berada pada tahap sangat awal. Hasil penelitian mendukung penelitian Sulvi Shafira Amalia, Indah Reski Amelia, Dewi Asnita, dan Nurhayati yang menunjukkan bahwa UMKM umumnya belum menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Di sisi lain, hasil penelitian ini berbeda dengan Firda Azis yang menemukan bahwa penerapan SAK EMKM dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan ketika standar tersebut diterapkan secara konsisten.⁶⁷ Temuan ini mempertegas perlunya strategi pendampingan yang berkelanjutan, sederhana, dan sesuai dengan kondisi lokal UMKM di Kecamatan Suppa.

⁶⁵ Sulvi Shafira Amalia, "Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis Sak-Emkm Di Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)," 2022.

⁶⁶ Indah Reski Amelia, "Persepsi Pengelola Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis Sak Emkm Di Kecamatan Panca Rijang," 2025.

⁶⁷ Firda Azis, "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Emkm Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada Toko Nur Rappang," 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan sistem pencatatan keuangan UMKM di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang masih sangat sederhana dan belum terstruktur. Sebagian pelaku UMKM tidak melakukan pencatatan keuangan, sedangkan sebagian lainnya hanya mencatat secara sederhana berupa jumlah barang terjual, uang hasil penjualan, atau catatan pelanggan. Seluruh pelaku UMKM belum mencatat biaya usaha, aset, utang, modal, pendapatan, dan beban secara lengkap dan konsisten.
2. Kesesuaian laporan keuangan UMKM dengan SAK EMKM belum terpenuhi. Pelaku UMKM belum menyusun laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Pelaku UMKM yang mengetahui SAK EMKM juga belum menerapkan standar tersebut dalam usaha. Dengan demikian, praktik pencatatan dan pelaporan keuangan UMKM yang diteliti belum sesuai dengan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam SAK EMKM.
3. Kendala penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Suppa terdiri atas kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi rendahnya pemahaman akuntansi, belum mengetahui SAK EMKM, belum terbiasa menyusun laporan keuangan, kebiasaan mengelola usaha secara informal, dan tidak adanya tenaga khusus pembukuan. Kendala eksternal meliputi belum adanya pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi praktis mengenai pencatatan keuangan dan SAK EMKM.

B. Saran

1. Bagi Pelaku UMKM

Bagi pelaku UMKM, disarankan untuk mulai melakukan pencatatan sederhana secara rutin, minimal mencatat kas masuk, kas keluar, pembelian, biaya operasional, utang, piutang, dan persediaan. Pencatatan tersebut dapat menjadi dasar awal untuk menyusun laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan sederhana.

2. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah daerah, dinas koperasi dan UMKM, perguruan tinggi, serta lembaga pendamping, disarankan menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan SAK EMKM yang bersifat praktis, bertahap, dan sesuai karakteristik usaha lokal. Materi pelatihan sebaiknya tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga memberikan contoh buku kas, format laporan laba rugi, daftar aset, dan catatan utang-piutang yang mudah digunakan pelaku usaha.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas jumlah informan, membandingkan antarjenis usaha, atau mengembangkan model pencatatan berbasis spreadsheet atau aplikasi sederhana yang sesuai dengan kebutuhan UMKM di Kecamatan Suppa. Penelitian selanjutnya juga dapat menguji efektivitas pelatihan SAK EMKM terhadap perubahan perilaku pencatatan keuangan pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Sahara, I. (2020). Analisis Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Pelaksanaan Program Kerja Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare.
- Muhlisa, S., Muhammadun, M., & Sahara, I. (2022). Comparisonal Analysis Of Financial Distress On Sharia Bank And Conventional Bank Based On The Altman Z-Score Method. *Islamic Financial And Accounting Review*, 1(1), 24-33.
- Naim, M. Y. N., Gani, M. U., & Purnamasari, R. (2019). Pengaruh Kepemimpinan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Etos Kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor area Makassar. *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 259-280.
- Mirna, S., & Purnamasari, R. (2023). Analysis Of Profit Margin In Murabahah Financing At Bmt Fauzan Azhiima, Parepare City. *Islamic Financial And Accounting Review*, 2(1), 1-4.
- Rahmayanti, R., & Purnamasari, R. (2023). The influence of financial literacy and lifestyle on financial management behavior of career women in Pitu Riawa District. *Islamic Financial And Accounting Review*, 1(2), 69-80.
- Amalia, Sulvi Shafira. "Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis Sak-Emkm Di Parepare (Analisis Akuntansi Syariah) Oleh," 2022.
- Amelia, Indah Reski. "Persepsi Pengelola Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis Sak Emkm Di Kecamatan Panca Rijang," 2025.
- Asnita, Dewi. "Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Laporan Keuangan Toko Rezky Sidenreng Rappang." IAIN PAREPARE, 2022.
- Devyana, Oryza Ayu. "Perancangan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah: Studi Kasus Pada Apotek Titian Sehat Malang."

- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- EMKM, S A K. “Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Pada UMKM Ud Sari Bunga.” *Journal of Accounting* 2, no. 2 (2020): 38–48.
- Fadlol, M Ainul, Titin Kartini, and Sri Kantun. “Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Oryza Mart Jember Periode 2017.” *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 12, no. 2 (2018): 270–76.
- Firda Azis. “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Emkm Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada Toko Nur Rappang,” 2024.
- Herawati, Helmi. “Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan.” *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz* 2, no. 1 (2019): 16–25.
- Indonesia, Ikatan Akuntan. “Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah.” *Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan* 33 (2016).
- Junaidi, Riky Rizki, and Ratri Paramitalaksmi. *Buku Referensi Akuntansi Keuangan Menengah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Kelman, Herbert C. “Processes of Opinion Change.” In *Attitude Change*, 205–33. Routledge, 2017.
- Khamidah, Risalatul. “Implementasi Laporan Keuangan Umkm Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (Sak-Emkm)(Kasus Pada Depo Air Isi Ulang Burdah Water).” Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020.
- Kieso, Donald E, Jerry J Weygandt, Terry D Warfield, Laura D Wiley, Irene M Wiecek, and Bruce J McConomy. *Intermediate Accounting, Volume 1*. John Wiley & Sons, 2025.
- Ningrum, Annisa. “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan.” *Diambil Dari Http://Ovy19. Wordpress. Com. Diakses (24 Maret 2022)*, 2010.
- Nurhayati. “Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Laporan Keuangan Pada Usaha

- Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang,” 2023.
- Purba, Tri Sukma Ayu, Rati Dormeska Simbolon, Anna Maria Simbolon, Jeremy Suparto Sianipar, and Hicca Maria Gandhi Putri Aruan. “Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Di Indonesia.” *Economics and Digital Business Review* 6, no. 2 (2025): 1322–30.
- Rahadiansyah, Rifky. “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (Sak Emkh) Pada Umkh Keripik Tempe Rohani Sanan Kota Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Riana, Riana. “Penerapan Dan Penyajian Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (Sak Emkh) Pada Ud Tiga Putra.” STIE PGRI Dewantara Jombang, 2023.
- Saroji, Eji. “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.” *Jurnal Akuntansi UMMI* 1, no. 2 (2021): 1–9.
- Simanjuntak, Natasha, Tinneke E M Sumual, and Aprili Bacilius. “Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Sak-Emkh: Studi Kasus Pada UMKM Delli Tomohon.” *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2020, 35–44.
- Soemarso, S R, and Akuntansi Suatu Pengantar. “Edisi 5.” Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Suparti, Hana, and M Th. *RESEARCH DESIGN: (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif Dalam Penyusunan Tesis Dan Disertasi)*. Dunia Penerbitan buku, 2026.
- Susanto, Dedi, and M Syahrani Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.
- Susilowati, Eni, M A B Dwi Riana SE, S E Yesita Astarina, S E Claudya Nurcahya, Sri Yulianti, S Sos, Irvan Ali Mustofa, M S A SE, S E Dicky Andriyanto, and S E Yanti Krismayanti. *Pengantar Akuntansi*. Basya Media Utama, 2024.
- Tria, N R. “PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, ESTIMASI,” n.d.

- Ulupui, I Gusti Ketut Agung, Ety Gurendrawati, and Yunika Murdayanti. *Pelaporan Keuangan Dan Praktik Pengungkapan*. Goresan Pena, 2021.
- Warren, Carl S, James M Reeve, and Jonathan E Duchac. "Financial and Managerial Accounting." (*No Title*), 2016.
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Vol. 2. University of California press, 1978.
- Widyastuti, Pristiana. "Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Bidang Jasa." *Journal for Business and Entrepreneurship* 1, no. 1 (2017).



LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Meneliti



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2967/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

12 Juni 2026

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUH.ASRUL AGUS
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 03 Agustus 2001
NIM	: 19.2800.048
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester	: XIV (Empat Belas)
Alamat	: DESA WIRINGTASI, KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA UMKM DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 13 Juni 2026 sampai dengan tanggal 13 Juli 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Andi Bahri S, ME., M.Fil.I
NIP 197811012009121003

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 2: Surat Izin Meneliti (Dinas)



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0388/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2026

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 25-06-2026 atas nama MUH. ASRUL AGUS, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0403/R/T.Teknis/DPMPPTSP/06/2026, Tanggal : 25-06-2026
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0390/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2026, Tanggal : 25-06-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
3. Nama Peneliti	: MUH. ASRUL AGUS
4. Judul Penelitian	: ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA UMKM DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: UMKM KECAMATAN SUPPA
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Suppa

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 25-12-2026.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 25 Juni 2026



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANL, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang





Balai Sertifikasi Elektronik



CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM URS



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DPMPPTSP

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3: Surat Selesai Meneliti

 **PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
KECAMATAN SUPPA
Jl. BauMassepe No. 4. Tlp. 3313598

SURAT KETERANGAN
Nomor : 115/KSP/VI/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini, Camat Suppa menerangkan bahwa :

N a m a : MUH. ASRUL AGUS
NIM : 19.2800.048
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/Program : Mahasiswa / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
A l a m a t : Dusun Lero B, Desa Wiring Tasi, Kec. Suppa

Sepanjang pengetahuan kami sampai dengan surat keterangan ini dibuat benar telah melaksanakan penelitian di wilayah Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA UMKM DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majennang, 25 Juni 2026


ANDIMULIANA, SE
Nip. 19710923 199203 2 012

CS dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4: Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MUH. ASRUL AGUS
NIM : 192800048
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (SAK EMKM) PADA UMKM DI
KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG

A. Identitas Informan dan Profil Usaha

Nama :
Nama Usaha :
Lama usaha berjalan :
Jenis usaha/produk :
Jumlah tenaga kerja :
Omzet rata-rata per bulan:
Status izin usaha :
Sumber modal usaha :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Bapak/Ibu melakukan pencatatan keuangan dalam menjalankan usaha ini? Jika ya, sejak kapan pencatatan tersebut dilakukan?
2. Apa saja transaksi yang biasanya dicatat dalam usaha ini (misalnya penjualan, pembelian bahan baku, biaya operasional, dan lain-lain)?
3. Apakah Bapak/Ibu mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha secara rutin setiap hari atau dalam periode tertentu?
4. Apakah Bapak/Ibu mencatat seluruh biaya usaha, seperti pembelian bahan baku, listrik, transportasi, upah tenaga kerja, dan biaya lainnya?
5. Apakah Bapak/Ibu melakukan pencatatan terhadap utang usaha atau piutang pelanggan? Bagaimana cara pencatatannya?
6. Apakah Bapak/Ibu menyusun laporan keuangan secara berkala, seperti laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan (aset, utang, dan modal)?
7. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar atau mengetahui tentang SAK EMKM sebagai standar penyusunan laporan keuangan bagi UMKM?
8. Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat pencatatan dan penyusunan laporan keuangan bagi perkembangan usaha yang dijalankan?
9. Kendala apa saja yang Bapak/Ibu hadapi dalam melakukan pencatatan atau penyusunan laporan keuangan usaha?
10. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan pelatihan, pendampingan, atau sosialisasi terkait pencatatan keuangan maupun SAK EMKM? Jika belum, apakah Bapak/Ibu bersedia mengikuti pelatihan tersebut?

C. Pertanyaan Penutup

1. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu dilakukan agar UMKM di Kecamatan Suppa dapat menerapkan pencatatan keuangan yang lebih baik?
2. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait pengelolaan keuangan usaha?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

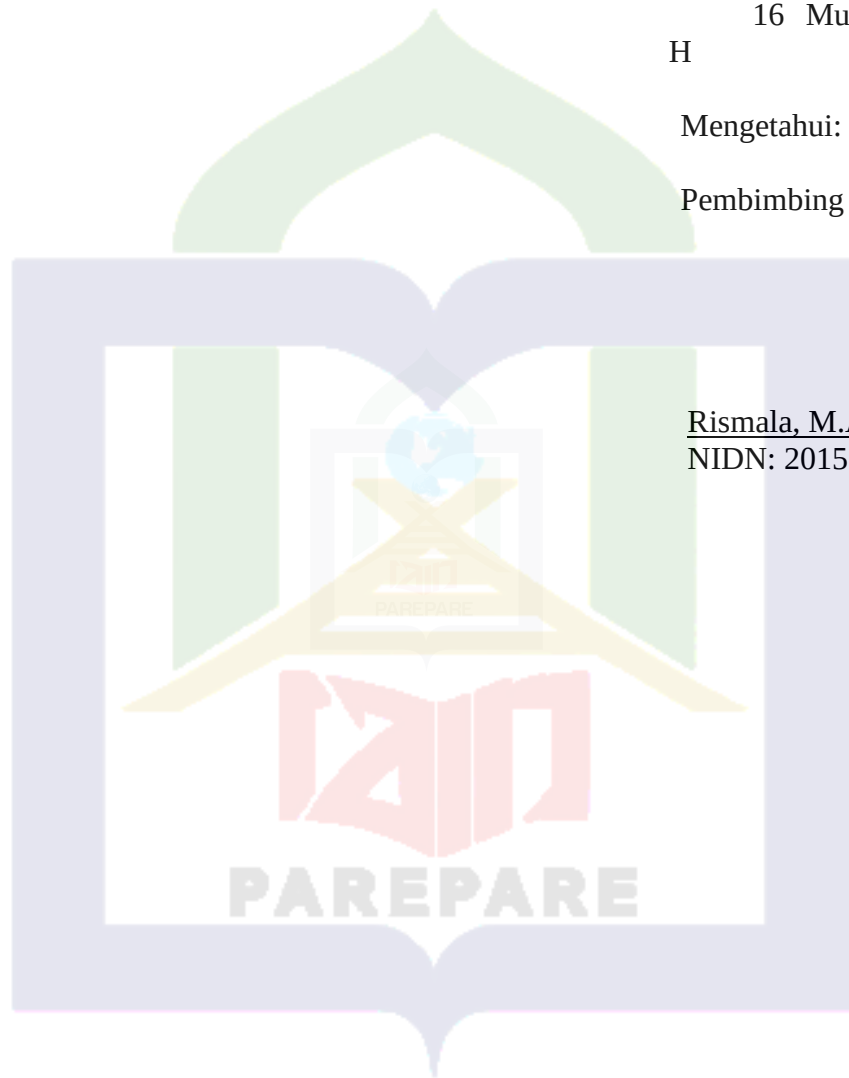
Parepare, 1 Juli 2026
16 Muharam 1448

H

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Rismala, M.Ak.
NIDN: 2015118403



Lampiran 5: Transkrip Wawancara

A. Identitas Informan dan Profil Usaha

Nama	: Ibu Suriyani
Nama Usaha	: Usaha Budidaya Udang dan Ikan Bandeng
Lama Usaha Berjalan	: 2 Tahun
Jenis Usaha/Produk	: Udang dan Ikan Bandeng
Jumlah Tenaga Kerja	: 2 Orang
Omzet Rata-rata per Bulan	: ±Rp6.000.000 – Rp10.000.000
Status Izin Usaha	: Tidak Ada
Sumber Modal Usaha	: Modal Pribadi

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Bapak/Ibu melakukan pencatatan keuangan dalam menjalankan usaha ini? Jika ya, sejak kapan pencatatan tersebut dilakukan?

Jawaban: Tidak, saya tidak melakukan pencatatan keuangan. Saya hanya menyimpan nota penjualan dari pembeli.

2. Apa saja transaksi yang biasanya dicatat dalam usaha ini (misalnya penjualan, pembelian bahan baku, biaya operasional, dan lain-lain)?

Jawaban: Tidak ada pencatatan transaksi, hanya nota penjualan yang disimpan.

3. Apakah Bapak/Ibu mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha secara rutin setiap hari atau dalam periode tertentu?

Jawaban: Tidak, pemasukan dan pengeluaran tidak dicatat secara rutin.

4. Apakah Bapak/Ibu mencatat seluruh biaya usaha, seperti pembelian bahan baku, listrik, transportasi, upah tenaga kerja, dan biaya lainnya?

Jawaban: Tidak, biaya usaha hanya saya ingat saja.

5. Apakah Bapak/Ibu melakukan pencatatan terhadap utang usaha atau piutang pelanggan? Bagaimana cara pencatatannya?

Jawaban: Tidak ada pencatatan utang atau piutang karena pembayaran dilakukan langsung.

6. Apakah Bapak/Ibu menyusun laporan keuangan secara berkala, seperti laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan (aset, utang, dan modal)?

Jawaban: Tidak, saya tidak pernah menyusun laporan keuangan.

7. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar atau mengetahui tentang SAK EMKM sebagai standar penyusunan laporan keuangan bagi UMKM?

Jawaban: Belum pernah mendengar tentang SAK EMKM.

8. Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat pencatatan dan penyusunan laporan keuangan bagi perkembangan usaha yang dijalankan?

Jawaban: Untuk mengetahui pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan usaha.

9. Kendala apa saja yang Bapak/Ibu hadapi dalam melakukan pencatatan atau penyusunan laporan keuangan usaha?

Jawaban: Saya belum memahami cara mencatat dan membuat laporan keuangan.

10. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan pelatihan, pendampingan, atau sosialisasi terkait pencatatan keuangan maupun SAK EMKM? Jika belum, apakah Bapak/Ibu bersedia mengikuti pelatihan tersebut?

Jawaban: Belum pernah, tetapi saya bersedia mengikuti jika ada pelatihan.

C. Pertanyaan penutup

1. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu dilakukan agar UMKM di Kecamatan Suppa dapat menerapkan pencatatan keuangan yang lebih baik?

Jawaban: Perlu pelatihan dan pendampingan agar kita ini bisa mencatat keuangan dengan baik.

2. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait pengelolaan keuangan usaha?

Jawaban: Saya berharap ada bimbingan agar lebih paham dalam mengelola keuangan usaha.

A. Identitas Informan dan Profil Usaha

Nama	: Ibu Rohani
Nama Usaha	: Usaha Jual Bensin Eceran (Tidak memiliki nama usaha khusus)
Lama Usaha Berjalan	: 3 Tahun
Jenis Usaha/Produk	: Bensin eceran
Jumlah Tenaga Kerja	: 2 Orang
Omzet Rata-rata per Bulan	: ±Rp2.000.000–Rp4.000.000
Status Izin Usaha	: Tidak Ada
Sumber Modal Usaha	: Pinjaman dari Koperasi

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Bapak/Ibu melakukan pencatatan keuangan dalam menjalankan usaha ini? Jika ya, sejak kapan pencatatan tersebut dilakukan?

Jawaban: Tidak, saya hanya mencatat penjualan sederhana saja.

2. Apa saja transaksi yang biasanya dicatat dalam usaha ini (misalnya penjualan, pembelian bahan baku, biaya operasional, dan lain-lain)?

Jawaban: Saya hanya mencatat jumlah bensin yang terjual dan uang hasil penjualan.

3. Apakah Bapak/Ibu mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha secara rutin setiap hari atau dalam periode tertentu?

Jawaban: Hanya pencatatan sederhana saat ada penjualan.

4. Apakah Bapak/Ibu mencatat seluruh biaya usaha, seperti pembelian bahan baku, listrik, transportasi, upah tenaga kerja, dan biaya lainnya?

Jawaban: Biaya usaha tidak dicatat secara lengkap.

5. Apakah Bapak/Ibu melakukan pencatatan terhadap utang usaha atau piutang pelanggan? Bagaimana cara pencatatannya?

Jawaban: Tidak ada pencatatan utang atau piutang karena transaksi dilakukan langsung.

6. Apakah Bapak/Ibu menyusun laporan keuangan secara berkala, seperti laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan (aset, utang, dan modal)?

Jawaban: Saya tidak pernah menyusun laporan keuangan dan tidak tahu hal seperti itu.

7. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar atau mengetahui tentang SAK EMKM sebagai standar penyusunan laporan keuangan bagi UMKM?

Jawaban: Belum pernah mendengar tentang SAK EMKM.

8. Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat pencatatan dan penyusunan laporan keuangan bagi perkembangan usaha yang dijalankan?

Jawaban: Untuk mengetahui pemasukan.

9. Kendala apa saja yang Bapak/Ibu hadapi dalam melakukan pencatatan atau penyusunan laporan keuangan usaha?

Jawaban: Saya tidak memahami cara membuat pencatatan dan laporan keuangan.

10. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan pelatihan, pendampingan, atau sosialisasi terkait pencatatan keuangan maupun SAK EMKM?

Jawaban: Belum pernah, tetapi saya bersedia jika ada pelatihan.

C. Pertanyaan penutup

1. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu dilakukan agar UMKM di Kecamatan Suppa dapat menerapkan pencatatan keuangan yang lebih baik?

Jawaban: Perlu pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM.

2. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait pengelolaan keuangan usaha?

Jawaban: Saya berharap ada bimbingan tapi lebih mudah seperti ini.

A. Identitas Informan dan Profil Usaha

Nama	: Yusuf
Nama Usaha	: Fauzan RO
Lama Usaha Berjalan	: 6 tahun
Jenis Usaha/Produk	: Depot Air Minum Isi Ulang (Galon)
Jumlah Tenaga Kerja	: 3 orang
Omzet Rata-rata per Bulan	: ± Rp14.400.000
Status Izin Usaha	: Memiliki izin usaha
Sumber Modal Usaha	: Pinjaman bank

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Bapak melakukan pencatatan keuangan dalam menjalankan usaha ini? Jika ya, sejak kapan pencatatan tersebut dilakukan?

Jawaban: Saya melakukan pencatatan sederhana sejak usaha mulai berjalan. Pencatatan hanya dilakukan untuk mengetahui jumlah galon yang diantar kepada pelanggan.

2. Apa saja transaksi yang biasanya dicatat dalam usaha ini (misalnya penjualan, pembelian bahan baku, biaya operasional, dan lain-lain)?

Jawaban: Transaksi yang dicatat hanya jumlah galon yang diambil atau diantar ke pelanggan. Pembelian bahan baku dan biaya operasional tidak dicatat secara khusus.

3. Apakah Bapak mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha secara rutin setiap hari atau dalam periode tertentu?

Jawaban: Pencatatan hanya pada saat pengantaran galon kepada pelanggan.

4. Apakah Bapak mencatat seluruh biaya usaha, seperti pembelian bahan baku, listrik, transportasi, upah tenaga kerja, dan biaya lainnya?

Jawaban: Tidak. Biaya-biaya itu tidak dicatat secara rinci.

5. Apakah Bapak melakukan pencatatan terhadap utang usaha atau piutang pelanggan? Bagaimana cara pencatatannya?

Jawaban: Piutang saya dicatat cara yang sama seperti pencatatan jumlah galon yang diambil oleh pelanggan.

6. Apakah Bapak menyusun laporan keuangan secara berkala, seperti laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan (aset, utang, dan modal)?

Jawaban: Saya tidak pernah menyusun laporan keuangan secara formal.

7. Apakah Bapak pernah mendengar atau mengetahui tentang SAK EMKM sebagai standar penyusunan laporan keuangan bagi UMKM?

Jawaban: Tidak pernah mendengar dan belum mengetahui tentang SAK EMKM.

8. Menurut Bapak, apa manfaat pencatatan dan penyusunan laporan keuangan bagi perkembangan usaha yang dijalankan?

Jawaban: Pencatatan sederhana membantu mengetahui jumlah galon yang terjual dan pelanggan yang masih memiliki tanggungan pembayaran.

9. Kendala apa saja yang Bapak hadapi dalam melakukan pencatatan atau penyusunan laporan keuangan usaha?

Jawaban: Saya tidak terlalu memahami cara menyusun laporan keuangan sehingga lebih memilih melakukan pencatatan sederhana yang mudah dipahami.

10. Apakah Bapak pernah mendapatkan pelatihan, pendampingan, atau sosialisasi terkait pencatatan keuangan maupun SAK EMKM? Jika belum, apakah Bapak bersedia mengikuti pelatihan tersebut?

Jawaban: Belum pernah mendapatkan pelatihan atau sosialisasi terkait pencatatan keuangan maupun SAK EMKM. Jika ada kesempatan, saya bersedia mengikuti pelatihan tersebut.

C. Pertanyaan penutup

1. Menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan agar UMKM di Kecamatan Suppa dapat menerapkan pencatatan keuangan yang lebih baik?

Jawaban: Perlu adanya pelatihan dan pendampingan yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM mengenai cara melakukan pencatatan keuangan.

2. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait pengelolaan keuangan usaha?

Jawaban: Pencatatan sederhana yang dilakukan saat ini sudah membantu dalam menjalankan usaha, pengelolaan keuangan boleh juga agar pengelolaan keuangan usaha dapat dilakukan dengan lebih teratur.

A. Identitas Informan dan Profil Usaha

Nama : Dirwan Burhan
 Nama Usaha : UD Burhan
 Lama Usaha Berjalan : ±10 tahun
 Jenis Usaha/Produk : Perdagangan Telur Ayam Ras
 Jumlah Tenaga Kerja : 6 orang
 Omzet Rata-rata per Bulan : ± Rp252.000.000
 Status Izin Usaha : Memiliki izin usaha
 Sumber Modal Usaha : Pinjaman bank

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Bapak melakukan pencatatan keuangan dalam menjalankan usaha ini? Jika ya, sejak kapan pencatatan tersebut dilakukan?

Jawaban: Tidak, saya tidak melakukan pencatatan keuangan secara khusus dalam menjalankan usaha.

2. Apa saja transaksi yang biasanya dicatat dalam usaha ini (misalnya penjualan, pembelian bahan baku, biaya operasional, dan lain-lain)?

Jawaban: Tidak ada transaksi yang dicatat secara khusus. Hasil penjualan biasanya langsung digunakan untuk kebutuhan usaha lainnya seperti pembelian pakan dan kebutuhan operasional lainnya.

3. Apakah Bapak mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha secara rutin setiap hari atau dalam periode tertentu?

4. Jawaban: Saya tidak mencatat pemasukan maupun pengeluaran usaha secara rutin.

Apakah Bapak mencatat seluruh biaya usaha, seperti pembelian bahan baku, listrik, transportasi, upah tenaga kerja, dan biaya lainnya?

Jawaban: Mungkin tidak maksudnya biaya-biaya usaha tidak dicatat secara rinci.

5. Apakah Bapak melakukan pencatatan terhadap utang usaha atau piutang pelanggan? Bagaimana cara pencatatannya?

Jawaban: Tidak ada pencatatan khusus terkait utang maupun piutang usaha.

6. Apakah Bapak menyusun laporan keuangan secara berkala, seperti laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan (aset, utang, dan modal)?

Jawaban: Saya tidak menyusun laporan keuangan secara berkala.

7. Apakah Bapak pernah mendengar atau mengetahui tentang SAK EMKM sebagai standar penyusunan laporan keuangan bagi UMKM?

Jawaban: Ya, saya pernah mendengar dan mempelajari SAK EMKM ketika masih kuliah.

8. Menurut Bapak, apa manfaat pencatatan dan penyusunan laporan keuangan bagi perkembangan usaha yang dijalankan?

Jawaban: Pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dapat membantu mengetahui kondisi usaha, keuntungan yang diperoleh, serta perkembangan usaha dari waktu ke waktu.

9. Kendala apa saja yang Bapak hadapi dalam melakukan pencatatan atau penyusunan laporan keuangan usaha?

Jawaban: Tidak ada kendala yang berarti. Namun, saya lebih nyaman menjalankan usaha dengan cara yang selama ini dilakukan tanpa pencatatan keuangan formal.

10. Apakah Bapak pernah mendapatkan pelatihan, pendampingan, atau sosialisasi terkait pencatatan keuangan maupun SAK EMKM? Jika belum, apakah Bapak bersedia mengikuti pelatihan tersebut?

Jawaban: Saya pernah memperoleh pengetahuan mengenai SAK EMKM saat kuliah. Jika ada pelatihan atau pendampingan yang dapat membantu pengelolaan usaha, saya bersedia mengikutinya.

C. Pertanyaan penutup

1. Menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan agar UMKM di Kecamatan Suppa dapat menerapkan pencatatan keuangan yang lebih baik?

Jawaban: Perlu adanya pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan agar pelaku UMKM memahami manfaat pencatatan keuangan dan mampu menerapkannya dalam kegiatan usaha sehari-hari.

2. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait pengelolaan keuangan usaha?

Jawaban: Pencatatan keuangan memang penting untuk mengetahui kondisi usaha. Namun, dalam praktiknya saya lebih nyaman menjalankan usaha dengan cara yang selama ini telah diterapkan.

A. Identitas Informan dan Profil Usaha

Nama	: Adama
Nama Usaha	: UD Adama
Lama Usaha Berjalan	: ±8 Tahun
Jenis Usaha/Produk	: Perdagangan Telur Ayam Ras
Jumlah Tenaga Kerja	: 5 Orang
Omzet Rata-rata per Bulan	: ± Rp123.840.000
Status Izin Usaha	: Memiliki Izin Usaha
Sumber Modal Usaha	: Pinjaman Bank

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Bapak melakukan pencatatan keuangan dalam menjalankan usaha ini? Jika ya, sejak kapan pencatatan tersebut dilakukan?

Jawaban: Saya tidak membuat pencatatan keuangan secara khusus. Selama ini usaha berjalan berdasarkan perputaran usaha yang ada.

2. Apa saja transaksi yang biasanya dicatat dalam usaha ini (misalnya penjualan, pembelian bahan baku, biaya operasional, dan lain-lain)?

Jawaban: Tidak ada transaksi yang dicatat secara teratur. Hasil penjualan biasanya langsung digunakan kembali untuk kebutuhan usaha.

3. Apakah Bapak mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha secara rutin setiap hari atau dalam periode tertentu?

Jawaban: Saya tidak mencatat pemasukan maupun pengeluaran secara rutin.

4. Apakah Bapak mencatat seluruh biaya usaha, seperti pembelian bahan baku, listrik, transportasi, upah tenaga kerja, dan biaya lainnya?

Jawaban: Biaya-biaya usaha langsung digunakan sesuai kebutuhan sehingga tidak dibuat pencatatan tersendiri.

5. Apakah Bapak melakukan pencatatan terhadap utang usaha atau piutang pelanggan? Bagaimana cara pencatatannya?

Jawaban: Tidak ada pencatatan khusus mengenai utang ataupun piutang usaha.

6. Apakah Bapak menyusun laporan keuangan secara berkala, seperti laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan (aset, utang, dan modal)?

Jawaban: Tidak pernah menyusun laporan keuangan secara berkala.

7. Apakah Bapak pernah mendengar atau mengetahui tentang SAK EMKM sebagai standar penyusunan laporan keuangan bagi UMKM?

Jawaban: Belum pernah mendengar tentang SAK EMKM.

8. Menurut Bapak, apa manfaat pencatatan dan penyusunan laporan keuangan bagi perkembangan usaha yang dijalankan?

Jawaban: Menurut saya pencatatan keuangan penting supaya pemilik usaha bisa mengetahui keuntungan dan kondisi usaha yang sebenarnya.

9. Kendala apa saja yang Bapak hadapi dalam melakukan pencatatan atau penyusunan laporan keuangan usaha?

Jawaban: Saya belum memahami cara membuat pencatatan dan laporan keuangan yang benar sehingga sampai sekarang belum menerapkannya.

10. Apakah Bapak pernah mendapatkan pelatihan, pendampingan, atau sosialisasi terkait pencatatan keuangan maupun SAK EMKM? Jika belum, apakah Bapak bersedia mengikuti pelatihan tersebut?

Jawaban: Belum pernah mendapatkan pelatihan. Jika ada kegiatan yang bisa membantu pelaku usaha memahami pencatatan keuangan, saya bersedia ikut.

C. Pertanyaan penutup

1. Menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan agar UMKM di Kecamatan Suppa dapat menerapkan pencatatan keuangan yang lebih baik?

Jawaban: Perlu ada pelatihan yang sederhana dan mudah dipahami agar pelaku usaha bisa mulai menerapkan pencatatan keuangan.

2. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait pengelolaan keuangan usaha?

Jawaban: Saya berharap ada pendampingan secara langsung sehingga pelaku UMKM tidak merasa kesulitan saat mulai membuat pencatatan keuangan.

A. Identitas Informan dan Profil Usaha

Nama : Alimin
 Nama Usaha : UD Alimin
 Lama Usaha Berjalan : ±7 Tahun
 Jenis Usaha/Produk : Perdagangan Telur Ayam Ras
 Jumlah Tenaga Kerja : 5 Orang
 Omzet Rata-rata per Bulan : ± Rp92.880.000
 Status Izin Usaha : Memiliki Izin Usaha
 Sumber Modal Usaha : Pinjaman Bank

B. Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan yang diajukan kepada salah satu UMKM

Peneliti:

1. Apakah Bapak melakukan pencatatan keuangan dalam menjalankan usaha ini? Jika ya, sejak kapan pencatatan tersebut dilakukan?

Jawaban: Tidak, saya tidak melakukan pencatatan keuangan. Yang saya perhatikan lebih banyak pada jalannya usaha sehari-hari.

2. Apa saja transaksi yang biasanya dicatat dalam usaha ini (misalnya penjualan, pembelian bahan baku, biaya operasional, dan lain-lain)?

Jawaban: Tidak ada pencatatan khusus untuk transaksi usaha. Uang hasil penjualan biasanya langsung dipakai kembali untuk membeli kebutuhan usaha.

3. Apakah Bapak mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha secara rutin setiap hari atau dalam periode tertentu?

Jawaban: Tidak ada pencatatan rutin yang saya lakukan untuk pemasukan maupun pengeluaran.

4. Apakah Bapak mencatat seluruh biaya usaha, seperti pembelian bahan baku, listrik, transportasi, upah tenaga kerja, dan biaya lainnya?

Jawaban: Tidak dicatat secara rinci. Selama ini biaya usaha langsung dikeluarkan sesuai kebutuhan operasional.

5. Apakah Bapak melakukan pencatatan terhadap utang usaha atau piutang pelanggan? Bagaimana cara pencatatannya?

Jawaban: Tidak ada pencatatan khusus mengenai utang dan piutang.

6. Apakah Bapak menyusun laporan keuangan secara berkala, seperti laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan (aset, utang, dan modal)?

Jawaban: Tidak pernah membuat laporan keuangan secara formal.

7. Apakah Bapak pernah mendengar atau mengetahui tentang SAK EMKM sebagai standar penyusunan laporan keuangan bagi UMKM?

Jawaban: Saya belum pernah mendengar mengenai SAK EMKM.

8. Menurut Bapak, apa manfaat pencatatan dan penyusunan laporan keuangan bagi perkembangan usaha yang dijalankan?

Jawaban: Dengan adanya pencatatan keuangan, pemilik usaha bisa lebih mudah mengetahui pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan usaha.

9. Kendala apa saja yang Bapak hadapi dalam melakukan pencatatan atau penyusunan laporan keuangan usaha?

Jawaban: Kendalanya karena saya belum memahami cara menyusun laporan keuangan dan belum pernah belajar secara khusus mengenai hal tersebut.

10. Apakah Bapak pernah mendapatkan pelatihan, pendampingan, atau sosialisasi terkait pencatatan keuangan maupun SAK EMKM? Jika belum, apakah Bapak bersedia mengikuti pelatihan tersebut?

Jawaban: Belum pernah mendapatkan pelatihan ataupun sosialisasi. Jika ada kesempatan, saya bersedia mengikuti agar bisa menambah pengetahuan dalam mengelola keuangan usaha.

C. Pertanyaan penutup

1. Menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan agar UMKM di Kecamatan Suppa dapat menerapkan pencatatan keuangan yang lebih baik?

Jawaban: Menurut saya perlu ada sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan supaya pelaku UMKM terbiasa melakukan pencatatan keuangan.

2. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait pengelolaan keuangan usaha?

Jawaban: Saya berharap pelaku UMKM mendapatkan bimbingan yang praktis sehingga pencatatan keuangan tidak dianggap sulit untuk diterapkan.

A. Identitas Informan dan Profil Usaha

Nama: Murti Novianti

Nama Usaha: Usaha Kantin Sekolah (Tidak memiliki nama usaha khusus)

Lama Usaha Berjalan: 2 Tahun

Jenis Usaha/Produk: Penjualan Makanan dan Minuman di Kantin Sekolah

Jumlah Tenaga Kerja: 1 Orang

Omzet Rata-rata per Bulan: ± Rp6.500.000 – Rp7.800.000

Status Izin Usaha: Tidak Memiliki Izin Usaha

Sumber Modal Usaha: Modal Pribadi

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Ibu melakukan pencatatan keuangan dalam menjalankan usaha ini? Jika ya, sejak kapan pencatatan tersebut dilakukan?

Jawaban: Saya hanya melakukan pencatatan sederhana. Biasanya setelah selesai berjualan saya menghitung uang hasil penjualan untuk mengetahui berapa pendapatan hari itu.

2. Apa saja transaksi yang biasanya dicatat dalam usaha ini (misalnya penjualan, pembelian bahan baku, biaya operasional, dan lain-lain)?

Jawaban: Yang saya catat hanya jumlah uang hasil penjualan. Untuk pembelian bahan baku dan kebutuhan lainnya biasanya tidak saya catat secara khusus.

3. Apakah Ibu mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha secara rutin setiap hari atau dalam periode tertentu?

Jawaban: Pemasukan kadang saya catat secara sederhana setelah selesai berjualan, tetapi pengeluaran usaha tidak dicatat secara rutin.

4. Apakah Ibu mencatat seluruh biaya usaha, seperti pembelian bahan baku, listrik, transportasi, upah tenaga kerja, dan biaya lainnya?

Jawaban: Tidak. Saya biasanya hanya mengingat biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan dagangan tanpa membuat catatan khusus.

5. Apakah Ibu melakukan pencatatan terhadap utang usaha atau piutang pelanggan? Bagaimana cara pencatatannya?

Jawaban: Tidak ada pencatatan piutang karena selama ini siswa yang membeli di kantin selalu membayar langsung dan belum pernah ada yang berutang.

6. Apakah Ibu menyusun laporan keuangan secara berkala, seperti laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan (aset, utang, dan modal)?

Jawaban: Tidak, saya belum pernah membuat laporan keuangan. Saya hanya menghitung hasil penjualan dan memperkirakan keuntungan yang diperoleh.

7. Apakah Ibu pernah mendengar atau mengetahui tentang SAK EMKM sebagai standar penyusunan laporan keuangan bagi UMKM?

Jawaban: Ya, saya pernah mengetahui dan mempelajari SAK EMKM saat masih kuliah, tetapi belum pernah menerapkannya dalam usaha yang saya jalankan.

8. Menurut Ibu, apa manfaat pencatatan dan penyusunan laporan keuangan bagi perkembangan usaha yang dijalankan?

Jawaban: Menurut saya pencatatan keuangan dapat membantu mengetahui pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan usaha sehingga usaha bisa dikelola dengan lebih baik.

9. Kendala apa saja yang Ibu hadapi dalam melakukan pencatatan atau penyusunan laporan keuangan usaha?

Jawaban: Kendalanya lebih karena saya belum terbiasa membuat laporan keuangan. Selain itu usaha yang saya jalankan masih skala kecil sehingga selama ini hanya melakukan pencatatan sederhana.

10. Apakah Ibu pernah mendapatkan pelatihan, pendampingan, atau sosialisasi terkait pencatatan keuangan maupun SAK EMKM? Jika belum, apakah Ibu bersedia mengikuti pelatihan tersebut?

Jawaban: Belum pernah mendapatkan pelatihan atau pendampingan terkait pencatatan keuangan maupun SAK EMKM. Jika ada pelatihan, saya bersedia mengikutinya untuk menambah pengetahuan dalam mengelola keuangan usaha.

C. Pertanyaan penutup

1. Menurut Ibu, apa yang perlu dilakukan agar UMKM di Kecamatan Suppa dapat menerapkan pencatatan keuangan yang lebih baik?

Jawaban: Perlu adanya pelatihan yang sederhana dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM agar mereka bisa mulai melakukan pencatatan keuangan dengan baik.

2. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan terkait pengelolaan keuangan usaha?

Jawaban: Saya berharap ada pendampingan yang lebih praktis sehingga pelaku usaha kecil dapat memahami cara mengatur dan mencatat keuangan usahanya dengan lebih teratur.

A. Identitas Informan dan Profil Usaha

Nama	: Amir
Nama Usaha	: Usaha Pangkalan Gas LPG 3 Kg
Lama Usaha Berjalan	: 10 Tahun
Jenis Usaha/Produk	: Penyaluran Gas LPG 3 Kg
Jumlah Tenaga Kerja	: 2 Orang
Omzet Rata-rata per Bulan	: ± Rp5.600.000
Status Izin Usaha	: Memiliki Izin Usaha
Sumber Modal Usaha	: Modal Pribadi

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Bapak melakukan pencatatan keuangan dalam menjalankan usaha ini? Jika ya, sejak kapan pencatatan tersebut dilakukan?

Jawaban: Tidak ada, saya tidak melakukan pencatatan keuangan.

2. Apa saja transaksi yang biasanya dicatat dalam usaha ini?

Jawaban: Tidak ada pencatatan keuangan. Saya hanya mencatat nama pelanggan dan nomor identitas, untuk pelanggan yang mengambil tabung yang banyak atau untuk keperluan data pangkalan.

3. Apakah Bapak mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha secara rutin setiap hari atau dalam periode tertentu?

Jawaban: Pemasukan dan pengeluaran tidak saya catat.

4. Apakah Bapak mencatat seluruh biaya usaha, seperti pembelian bahan baku, listrik, transportasi, upah tenaga kerja, dan biaya lainnya?

Jawaban: Tidak ada juga, biaya usaha tidak dicatat secara khusus.

5. Apakah Bapak melakukan pencatatan terhadap utang usaha atau piutang pelanggan? Bagaimana cara pencatatannya?

Jawaban: Tidak ada pencatatan utang atau piutang karena pelanggan langsung membayar saat mengambil gas.

6. Apakah Bapak menyusun laporan keuangan secara berkala, seperti laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan?

Jawaban: Tidak pernah, saya tidak pernah membuat laporan keuangan.

7. Apakah Bapak pernah mendengar atau mengetahui tentang SAK EMKM sebagai standar penyusunan laporan keuangan bagi UMKM?

Jawaban: Belum pernah mendengar tentang SAK EMKM.

8. Menurut Bapak, apa manfaat pencatatan dan penyusunan laporan keuangan bagi perkembangan usaha yang dijalankan?

Jawaban: Supaya bisa mengetahui pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan usaha.

9. Kendala apa saja yang Bapak hadapi dalam melakukan pencatatan atau penyusunan laporan keuangan usaha?

Jawaban: Saya belum memahami cara membuat pencatatan dan laporan keuangan.

10. Apakah Bapak pernah mendapatkan pelatihan, pendampingan, atau sosialisasi terkait pencatatan keuangan maupun SAK EMKM?

Jawaban: Belum pernah. Kalau ada pelatihan, saya bersedia ikut.

C. Pertanyaan penutup

1. Menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan agar UMKM di Kecamatan Suppa dapat menerapkan pencatatan keuangan yang lebih baik?

Jawaban: Perlu ada pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM.

2. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait pengelolaan keuangan usaha?

Jawaban: Saya berharap ada bimbingan supaya pelaku usaha lebih paham mengelola keuangan usahanya.



Lampiran 6: Matriks Koding Ringkas

Kode	Tema	Makna Analitis
P1	Tidak mencatat	Tidak ada catatan kas, pendapatan, beban, aset, utang, atau modal.
P2	Pencatatan sederhana	Catatan terbatas pada jumlah penjualan, barang terjual, atau pelanggan.
S1	Belum mengetahui SAK EMKM	Pelaku usaha belum pernah mendengar standar pelaporan UMKM.
S2	Mengetahui tetapi tidak menerapkan	Pengetahuan formal tidak berubah menjadi praktik karena belum terbiasa.
K1	Kendala pemahaman	Pelaku usaha tidak memahami cara menyusun laporan keuangan.
K2	Kendala pendampingan	Tidak ada pelatihan teknis yang praktis dan berkelanjutan.

Lampiran 7: Dokumentasi Penelitian



BIODATA PENULIS



Muh. Asrul Agus, lahir di Parepare pada tanggal 3 Agustus 2001. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Agus dan Ibu Suriyani. Penulis berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam.

Pendidikan formal penulis diawali di SD Negeri 97 Suppa dan diselesaikan pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Suppa dan lulus pada tahun 2016. Pendidikan menengah kejuruan ditempuh di SMK Negeri 7 Pinrang dan berhasil diselesaikan pada tahun 2019.

Pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak.), penulis menyusun skripsi yang berjudul "***Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (Sak Emkm) pada Umkm di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.***"